

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **DIAH PERMATA SARI**
NPM : 1403110167
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA MASSA NASIONAL. (Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Majalah Gatra**

Medan, 28 Maret 2018

PEMBIMBING



Dr. RUDIANTO, M.Si

Disetujui Oleh
KETUA PROGRAM STUDI



NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom



Plt. Dekan

Dr. RUDIANTO, M.Si

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **DIAH PERMATA SARI**

NPM : 1403110167

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**

Pada hari : Rabu, 28 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom** 

PENGUJI II : **Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A** 

PENGUJI III : **Dr. RUDIANTO, M.Si** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO, M.Si




Drs, ZULFAIMI, M.I.Kom

**PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA MASSA
NASIONAL**

**(Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko
Widodo dan Jusuf Kalla di Majalah Gatra)**

SKRIPSI

Oleh:

DIAH PERMATA SARI

NPM 1403110167

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Jurnalistik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya : Diah Permata Sari, NPM: 1403110167 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyatakan bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang Undang-Undang, oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah benar tulisan dan karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya beserta dengan hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencopotan gelar keserjanaan yang sudah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Diah Permata Sari

ABSTRAK

PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA MASSA NASIONAL

(ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN TIGA TAHUN

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA DI MAJALAH

GATRA)

Oleh: Diah Permata Sari
1403110167

Penelitian ini berjudul —Pembingkaihan Berita Media Massa Nasional (Analisis Framing Pemberitaan Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana majalah berita mingguan Gatra membingkai berita terkait tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sudut pandang politik dan penegakan hukum untuk mengetahui keberpihakan Gatra dalam memberitakannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis isi kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi massa, media massa, produk media massa, konstruksi realitas pemberitaan dalam media massa, teori level pengaruh media dan analisis *framing*. Sementara teknik analisis yang digunakan adalah analisis *framing* model Robert Entman. Berita yang menjadi objek penelitian adalah laporan utama edisi khusus tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang terbit pada tanggal 19-25 Oktober 2017 yang berjumlah empat berita. Empat berita tersebut dianalisis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dengan empat perangkat unit analisis, *define problem, diagnose cause, make moral judgement, treatment recommendation*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majalah Gatra dalam membingkai berita cenderung subjektif dan memihak pemerintah. Hal ini tampak pada narasi pemberitaan, *visual image*, penyajian hasil evaluasi lembaga survey, serta pemilihan narasumber yang kurang berimbang antara plus minus evaluasi kinerja pemerintah terkait isu kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional.

Kata Kunci : *Analisis Framing, Robert Entman, Majalah Gatra, Jokowi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil analisis peneliti yang dilaksanakan dari awal penelitian hingga selesai.

Dengan selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta Buliman dan Nurmi Jalill yang telah memberikan begitu banyak dukungan moril maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tidak pernah terputus untuk penulis. Dan Penulis berterimakasih juga kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor UMSU.
2. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Almarhum Bapak Tasrif Syam M.Si. selaku dekan FISIP UMSU sekaligus ayahanda kami yang telah berpulang ke rahmatullah Februari lalu.
8. Dosen FISIP UMSU yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
9. Bang Naldi, Bang Lindung, Kak Ayu dan Pegawai Birokrasi UMSU lainnya yang selama ini membantu menyelesaikan segala urusan kemahasiswaan.
10. Abdurrahman Fadhiil Pinem yang sampai saat ini menemani segala perbincangan dan perjalanan sederhana penulis.
11. Untuk teman sekaligus sahabat *sepergendutan* Syawilda Febriani Bey yang telah memberikan penulis motivasi untuk menguruskan badan sebelum wisuda.
12. Untuk anak-anak *touring*, Bang Arep, Oscar, Ejak, Mumus, Ira, Lutfi yang selama menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan banyak menemani dan membantu penulis.
13. Sahabat penulis yang saling mendukung dari kejauhan Yuli, Juned, Mira, Hanipah, Ucik, dan anak EXPOSE lainnya.

14. Immawan dan Immawati Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FISIP UMSU, terkhusus Stambuk Cengeng.

15. Teman-teman Ilmu komunikasi Stambuk 2014 yang saling mendukung satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Batasan Masalah 7

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II URAIAN TEORITIS 9

2.1 Komunikasi Massa 9

2.2 Media Massa 12

2.3 Produk Media Massa 15

2.4 Teori Hirarki Pengaruh Media 18

2.5 Konstruksi Realitas Pemberitaan Media Massa 19

2.6 Analisis Framing 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30

3.1 Jenis Penelitian 30

3.2 Kerangka Konsep 31

3.3 Defenisi Konsep 31

3.4 Kategorisasi 33

3.5 Narasumber 33

3.6 Teknik Pengumpulan Data 34

3.7 Teknik Analisis Data 35

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 38

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN 39

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 39

4.2 Hasil dan Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5.1 Model Framing Robert N. Entmant.....	27
Tabel 3.6.1 Contoh Tabel Daftar Berita.....	35
Tabel 3.7.1 Contoh Tabel Jumlah Paragraf.....	36
Tabel 3.7.2 Contoh Tabel Posisi Berita	36
Tabel 3.7.3 Contoh Tabel Narasumber	37
Tabel 3.7.4 Contoh Tabel Isu yang Menonjol.....	37
Tabel 3.7.5 Contoh Tabel Berita yang Diteliti	38
Tabel 3.7.6 Contoh Tabel Frame Isi Pemberitaan	38
Tabel 4.2.1 Profil Berita yang Diteliti	43
Tabel 4.2.2 Tabel Jumlah Paragraf	46
Tabel 4.2.3 Tabel Posisi Berita.....	47
Tabel 4.2.4 Tabel Narasumber	48
Tabel 4.2.5 Isu yang Ditonjolkan	50
Tabel 4.2.6 Analisi Framing Berita 1.....	51
Tabel 4.2.7 Analisi Framing Berita 2.....	57
Tabel 4.2.8 Analisi Framing Berita 3.....	61
Tabel 4.2.9 Analisi Framing Berita 4.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Oktober menjadi bulan yang selalu dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tepat pada tanggal 21 Oktober 2017 Presiden Jokowi-Jk genap tiga tahun menjalankan roda pemerintahan. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK ada banyak tanggapan bernada sinis yang menilai pemerintah Indonesia tidak mampu menjalankan mandatnya untuk memajukan negara. Meskipun tidak mutlak sebagai tolak ukur bagus tidaknya kinerja pemerintah, namun hasil survey yang dilakukan oleh Center For Strategic and International Studies (CSIS) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2017 mencapai 68,3 persen. Program infrastruktur yang mulai menampakkan hasil mendominasi dan menjadi indikator kepuasan tersebut. (news.liputan6.com).

Prioritas akselerasi infrastruktur pada tahun ketiga ini memang memperlihatkan nilai strategis. Daya saing menguat, kepercayaan publik dan pengakuan internasional pun menanjak. Terbukti lembaga badan dunia United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) menempatkan Indonesia di peringkat empat tujuan investasi global, naik dari 41 ke 36 dari 137 negara. Namun, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), memperlihatkan hutang-pun meningkat pesat di era Jokowi-Jk. Sampai Agustus 2017, total hutang pemerintah mencapai Rp 3.825,79 trilyun. Dengan kata lain, selama tiga tahun menjabat, Jokowi telah menambah hutang sebesar Rp

1217,01 trilyun atau meningkat 46,65% dibanding posisi akhir 2014 senilai Rp 2.608,78 trilyun. (Disadur dari majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017).

Ketika survey kepuasan masyarakat pada sektor pembangunan mengalami kenaikan, penanganan kegaduhan sosial dan politik malah mendapatkan rapor merah. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, pada era Jokowi-JK, kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan justru meningkat. Pasal-pasal terkait dugaan makar, penodaan agama, dan pencemaran nama baik jauh meningkat dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono . (Nasional.kompas.com)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun turut mengalami penurunan. Pada tahun 2014 IDI Indonesia mencapai angka 73,04, kemudian ditahun 2015 mencapai 72,82, dan pada tahun 2016 memiliki penurunan yang signifikan yakni 70,09. Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian, menilai penurunan indeks ini tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti halnya pengeluaran Perppu Ormas, penanganan aksi bela Islam, serta tindakan represif pemerintah atas ekspresi politik masyarakat di sosial media. Tidak jarang banyak penggiat media sosial terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sangkaan *hatespeech* (ujaran kebencian). (www.hidayatullah.com)

Media massa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam hal mendidik, menghibur, menginformasikan, membujuk, dan kontrol sosial. Fungsi media sebagai alat kontrol sosial berperan besar dalam mengawasi dan kemudian memberitakannya kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan Joko

Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam menjalankan fungsinya, media massa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Sebuah media bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya.(Hamad,2004:2-3).

Tidak dapat dipungkiri perjalanan media massa di Indonesia masih saja dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada era Orde Baru yang berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun menggunakan media massa nasional sebagai alat propaganda pemerintah. Bahkan pemberitaan yang ditayangkan pada saat itu harus melewati seleksi dari pemerintah untuk kemudian ditayangkan sehingga berita yang tayang adalah berita yang berpihak terhadap pemerintah. Berita yang mengkritisi pemerintah tidak akan pernah tayang. Beralih ke era kebebasan saat ini, selepas pemerintahan orde baru media massa masih saja dibayang-bayangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jika orde baru dibawah kendali kepentingan pemerintahan Soeharto, di era ini media berada dibawah kendali kepentingan pemilik media.

Roy Thaniago, Direktur Remotivi periode tahun 2010-2015 (dalam Arief dan Wisnu, 2015:7) mengatakan bahwa —di era kebebasan ini, kaum oligarki melalui industri media berkuasa merumuskan percakapan ratusan juta warga Indonesia. Media mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan apa yang dihindari untuk dibicarakan. Agenda publik menjadi pengejawantahan agenda

pemilik modal. Ruang publik disesaki oleh kepentingan elit untuk melayani nafsu ekonomi-politiknya. Kerja media dioperasikan dengan bersandar semata-mata pada pasar.(Purba, 2016: 17)

Salah satu media massa nasional yang ada sejak pemerintahan orde baru hingga kini adalah majalah berita mingguan Gatra. Majalah Gatra terbit karena pembredelan yang dilakukan pemerintahan orde baru terhadap majalah Tempo. Cikal bakal diterbitkannya majalah Gatra didasari atas sikap dari para awak majalah Tempo yang memilih untuk menerima pembredelan dan menerbitkan majalah baru dengan format baru. Hingga pada tanggal 19 November 1994 diterbitkannya majalah Gatra. Awal berdirinya majalah Gatra menuai pro kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat corong pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap merupakan simbol kekuasaan pemerintah karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. Sedangkan pihak yang pro Gatra menganggap kemunculan Gatra merupakan kehendak sejarah setelah majalah Tempo dibredel oleh pemerintah. (Purba, 2016:17)

Peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 21 Oktober 2017 ternyata memiliki nilai berita yang sangat tinggi bagi majalah berita mingguan Gatra dan menjadikan momentum tersebut sebagai edisi khusus dengan tema —Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Pemerataan Kerja Nyata—. Terbukti dari majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017, Gatra menaruh perhatian lebih dalam memberikan catatan jurnalistiknya dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai insan media. Edisi khusus ini terdapat 30 berita mengenai tiga tahun pemerintah

Jokowi-JK yang tersaji dalam dua sudut pandang besar, yakni pencapaian sektor ekonomi dan pencapaian bidang politik termasuk di dalamnya aspek penegakan hukum. Gatra pun juga mencantumkan hasil wawancara langsung dengan presiden dan wakil presiden beserta sejumlah menteri kabinet kerja ke dalam majalahnya.

Struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra tentu memiliki pengaruh terhadap pemberitaan tentang laporan utama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Hal ini dapat dilihat dari peletakan halaman dan juga jumlah berita dari setiap segmen yang dibuat oleh majalah Gatra. Segmen ekonomi dan pembangunan terlihat mendominasi di halaman depan majalah Gatra. Sedangkan segmen politik dan penegakan hukum berada pada halaman tengah menuju halaman belakang majalah Gatra. Selain itu dari sisi jumlah juga menunjukkan bahwa Gatra pada edisi khususnya kali ini lebih banyak memuat pencapaian sektor ekonomi dan pembangunan. Terbukti jumlah berita politik dan penegakan hukum hanya berjumlah 11 dari 30 berita yang ada.

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa struktur pemberitaan majalah Gatra ternyata berpengaruh terhadap bagaimana majalah Gatra memberitakan momentum peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Pemberitaan terkait bidang politik dan penegakan hukum berada pada prioritas yang kedua. Padahal kedua sudut pandang ini tak kalah dinamis. Apalagi ditengah isu SARA dan pemerintahan yang juga terkesan antikritik. Kebebasan berekspresi seolah dibungkam perlahan ditengah diterbitkannya Perppu Ormas.

Selain struktur pemberitaan yang dimiliki oleh majalah Gatra, catatan sejarah berdirinya majalah Gatra mungkin berpengaruh terhadap gaya penulisan ataupun keberpihakan majalah Gatra dalam menuliskan berita tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada awal berdirinya majalah Gatra dibiayai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintahan orde baru, yang berdasarkan catatan sejarah bahwa pemerintahan orde baru dikuasai Partai Golkar. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap gaya penulisan majalah Gatra, sehingga pada saat itu muncul pendapat dari beberapa kalangan bahwa majalah Gatra pada saat itu adalah alat dari pemerintah.

Seperti yang diketahui berita harus memenuhi beberapa unsur yang nantinya akan membuat suatu berita tersebut layak untuk dipublik. Berita harus cepat dan cermat, dalam bahasa jurnalistiknya harus akurat. Selain akurat berita juga juga harus berimbang tidak boleh memihak. Berita harus objektif, karena berita memiliki power untuk menciptakan opini publik. Jadi sesuatu yang ditulis oleh media harus memenuhi unsur-unsur berita agar tidak ada pihak yang dirugikan. (Kusumaningrat, 2006:47).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana majalah mingguan Gatra edisi 19-25 Oktober 2017 meringkai pemberitaan peringatan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada isu kebebasan berpendapat, SARA dan konsensus nasional dengan menggunakan analisis *framing* model analisis *framing* Robert N. Entman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diambil dan dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah majalah berita mingguan Gatra membingkai peristiwa dalam pemberitaan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait bidang politik dan penegakan hukum?”

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas, terarah dan tidak terlalu luas. Sehingga dapat menghindari salah penafsiran terhadap yang dimaksud peneliti, karena itu masalah yang diteliti ini terbatas pada :

1. Penelitian hanya dilakukan pada majalah berita mingguan Gatra yang terbit tanggal 19-25 Oktober 2017.
2. Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan mengenai tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait bidang politik dan penegakan hukum.
3. Penelitian hanya dilakukan pada pemberitaan yang menonjolkan isu kebebasan berekspresi, SARA, serta konsensus nasional.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui cara membingkai berita sekaligus melihat keberpihakan Majalah Berita Mingguan Gatra mengenai tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla”.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis dan praktis:

- a. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pengetahuan bagaimana pumbingkaiian berita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilakukan media cetak.
- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada mahasiswa yang tertarik menganalisis soal pemberitaan di media massa nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian

BAB II : Uraian Teoritis

Berisikan tentang Teori Komunikasi Massa, Media Massa, Produk Media Massa, Jurnalistik, Berita, Konstruksi Pemberitaan, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Analisis *Framing*

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, Waktu dan Lokasi Penelitian

BAB IV : Analisis Hasil dan Pembahasan

Berisikan Penyajian Hasil dan Pembahasan Penelitian

BAB V : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi Massa

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan sosial yang dilakoni manusia. Segala macam kehidupan manusia dapat dipastikan memerlukan komunikasi sebagai alat untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan dominan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan komunikasi manusia dan lingkungan saling mengenal satu sama lain dan bisa merasakan hal sekitarnya bahkan dengan dirinya.

Defenisi komunikasi sendiri telah banyak dijelaskan oleh para ahli. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendefenisikan komunikasi sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi. (Mulyana, 2005:68)

Paradigma positivis melihat komunikasi sebagai pengiriman pesan. Komunikasi disini dilihat sebagai suatu proses. Secara umum model komunikasi ini menyertakan pengirim (*sender*), penerima, dan medium melalui mana pesan-pesan dikirimkan. Gangguan (*noise*) adalah sesuatu yang terjadi di antara pengiriman pesan tersebut. Dalam komunikasi media surat kabar misalnya, medium adalah percetakan yang menghasilkan surat kabar, pengirim (*sender*) adalah wartawan atau editor, penerima adalah siapa pun yang membaca berita.

Sedangkan gangguan (*noise*) terjadi di antara proses tersebut, bisa karena tulisan yang buram, tak bisa dibaca, dan sebagainya. (Eriyanto,2002:44).

Berbeda dari paradigma positivis yang melihat komunikasi sebagai proses penyebaran, paradigma konstruksionis (produksi dan pertukaran makna) melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Fokus perhatian konstruksionis bukan bagaimana seseorang mengirimkan pesan, melainkan bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan mempertukarkan makna. (Eriyanto,2002:46-47).

Dari semua defenisi yang telah dijelaskan , maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa arti komunikasi itu sendiri adalah suatu proses transmisi pesan yang dilakukan antar kelompok atau individu dengan melibatkan berbagai simbol pesan sehingga dapat menimbulkan persamaan persepsi dan makna antar kedua belah pihak.

Salah satu formula yang sering dijadikan acuan oleh para pendidik di keilmuan komunikasi adalah dengan menggunakan formula milik Harold Laswell. Yang mana formula Laswell mengemukakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). (Effendy, 2007:253).

2.1.2 Pengertian Massa

Menurut Gustave Le Bon (pelopor psikologi massa), massa merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan yang berkumpul dan

mengadakan hubungan untuk sementara waktu karena minat atau kepentingan bersama yang bersifat sementara. (Tamburaka, 2012: 11).

Menurut Tamburaka (2012: 11), ciri-ciri massa antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdiri dari orang-orang dalam segala lapisan dan tingkatan dalam masyarakat.
- 2) Bersifat anonim dan heterogen.
- 3) Di antara mereka tidak terdapat interaksi atau pertukaran pengalaman, karena terpisah antara satu dengan yang lainnya.
- 4) Tidak mampu bertindak secara teratur karena longgar dalam ikatan organisasi.
- 5) Baik massa terlihat maupun yang tidak terlihat mempunyai ikatan pikiran, pertalian jiwa atau persamaan perasaan.
- 6) Massa tidak dapat berpikir secara kritis dan rasional, mudah percaya dan mudah disugesti.
- 7) Massa sangat mudah tersinggung, sangat fanatik, bersemangat, berani, dapat berbuat sesuatu tanpa memikirkan tanggung jawab.

2.1.3 Komunikasi Massa

Komunikasi massa ialah komunikasi melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Everett M. Rogers menyatakan bahwa selain media massa modern terdapat media massa tradisional

yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain. (Effendy, 2003:79)

Defenisi komunikasi massa yang paling sederhana dan populer dikemukakan oleh John R. Bittner yang menyatakan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. George Gebner, seorang ahli komunikasi lain, menyatakan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industry. (Komunikasipraktis.com)

Dalam UU No.40/1999 tentang pers, komunikasi massa memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan melakukan pengawasan sosial (*social control*).

Ada dua tugas komunikator dalam komunikasi massa: mengetahui apa yang ia ingin komunikasikan dan mengetahui bagaimana ia harus menyampaikan pesannya dalam rangka melancarkan penetrasi kepada benak komunikan. Sebuah pesan yang isinya lemah dan dengan lemah pula disampaikan kepada jutaan orang, bisa menimbulkan pengaruh yang kurang efektif dibandingkan dengan pesan yang disampaikan dengan baik kepada komunikan yang jumlahnya kecil. (Effendy, 2003:80)

2.2 Media Massa

Media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula. Media massa bukan hanya sebagai alat menyalurkan

pesan, tetapi juga adalah lembaga sosial dan lembaga bisnis. Media massa memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan politik, yaitu:

- a) Fungsi informasi
- b) Fungsi mendidik
- c) Fungsi hiburan
- d) Fungsi menghubungkan
- e) Fungsi kontrol sosial
- f) Fungsi membentuk pendapat umum

Sedang fungsi bisnis dari media massa ialah sebagai industri yang melayani konsumen yang membutuhkan informasi, pendidikan dan hiburan. (Arifin, 2011:160)

Media massa merupakan tempat untuk mempublikasikan berita. Penyampaian informasi dalam bentuk berita membutuhkan saluran komunikasi yang disebut media. Dalam dunia jurnalistik, media sendiri dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Media cetak, yakni surat kabar harian, surat kabar mingguan, tabloid, majalah, dan buletin/jurnal.
2. Media elektronik, yakni radio dan televisi.
3. Media online, yakni media internet seperti blog, website dan lainnya.

(Yunus, 2010:26-27)

Perkembangan media massa secara kuantitas yang pesat menjadikan peta persaingan media massa di Indonesia semakin dinamis, khususnya jika ditinjau dari segi pemeringkatan pembaca/pemirsa. Pada akhirnya tidak sedikit pula media

massa yang mengalami kebangkrutan atau tidak lama beroperasi. Banyak media massa, khususnya media cetak dan radio yang berguguran akibat ketatnya persaingan dan rendahnya animo masyarakat terhadap media tersebut. Banyak media massa yang kini tinggal nama karena tidak mendapat “tempat” di hati masyarakat. (Yunus, 2010:28)

Menurut Bill Kovach (Setiati, 2005:68-69), terdapat 9 elemen dalam media massa:

1. Media harus mengungkapkan kebenaran dalam pemberitaannya
2. Media harus loyal kepada masyarakat
3. Media harus menjunjung disiplin verifikasi
4. Media harus bisa menjaga independensi terhadap sumber berita
5. Media harus bisa menjadi pemantau kekuasaan pemerintah
6. Media harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga
7. Media harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan
8. Media harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional.
9. Menulis berita berdasarkan hati nurani

Media (pers) sering juga disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, sehingga tiap kelompok termasuk organisasi politik berusaha memiliki, menguasai atau mengontrol media.

Media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Oleh karena itulah dalam konteks media massa sebagai institusi informasi, Karl Deutsch (dalam Sobur, 2004:31) menyebutnya sebagai urat nadi pemerintah (*the nerves of government*). Hanya mereka yang mempunyai akses kepada informasi, kira-kira demikian Deutsch berargumentasi, yang bakal menguasai percaturan kekuasaan. Atau paling tidak, urat nadi pemerintahan itu sebenarnya berada di jaring-jaring informasi.

Penguasa otoriter menempatkan media massa dengan kekuasaan melalui izin, sensor dan pembredelan, agar media massa sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga pemerintah di negara liberal-kapitalis, pengusaha yang bermodal besar juga berusaha menentukan atau mengarahkan agenda politik media massa, dengan cara memiliki media massa sebagai industri sekaligus sebagai alat untuk mengkritik atau mengawasi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa agenda politik media massa bergantung kepada siapa yang mengontrol atau memilikinya. (Anwar, 2011: 162)

2.3 Produk Media Massa

2.3.1 Jurnalistik

Jurnalistik dalam dunia ilmu pengetahuan modern berkaitan dengan teori, metode, sistematika, objek studi, dan penelitian. Jurnalistik masuk dalam cabang

ilmu komunikasi massa (Amerika Serikat) yang sebelumnya disebut ilmu publisitik (Eropa). Jurnalistik atau jurnalisme secara etimologis berasal dari kata *journal* (Inggris) atau *du jour* (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. (Barus, 2010: 1-2).

Di Indonesia orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik disebut sebagai seorang jurnalis atau wartawan. Dalam praktiknya berdasarkan kerja para jurnalis tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu reporter dan editor. Reporter adalah jurnalis yang bertugas mencari dan mengumpulkan informasi melalui peliputan peristiwa atau kejadian. Sedangkan editor adalah jurnalis yang bertugas mengedit, dalam arti menilai, dan mempertimbangkan kelayakan informasi menjadi sebuah berita. Semua reporter bekerja langsung di bawah redaktur tertentu. (Tamburaka, 2012:129)

Wartawan atau pemimpin redaksi dapat menempatkan berita utama (headline) di halaman muka atau halaman dalam, atau memilih tokoh politik yang lain untuk ditonjolkan dalam media massa. Semuanya itu mengacu pada “politik redaksi”, kepribadian dan pencitraan media massa. Wartawan ataupun pemimpin redaksi sebagai *gatekeeper* berfungsi sebagai penyeleksi informasi. Merekalah yang kemudian menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan dan tidak, bahkan kewenangannya mencakup untuk memperluas atau membatasi informasi yang akan disiarkan. Hal ini kemudian berkembang menjadi agenda setter sebagaimana yang dikenal sebagai teori agenda setting. (Tamburaka, 2010:131)

2.3.2 Berita

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan —berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar. Dapat diartikan bahwa berita adalah keterangan mengenai satu kejadian tertentu dan memiliki unsur-unsur berita di dalamnya dan siapa saja dapat menulis berita.

Berita di media massa adalah hasil kerja jurnalistik seorang wartawan yang dituangkan lewat kata – kata yang dimuat di surat kabar, majalah, atau media lainnya. Berita berasal dari peristiwa yang terjadi di dunia, namun tidak semua peristiwa layak disajikan berita. Sebuah peristiwa bisa menjadi berita apabila peristiwa tersebut memiliki nilai – nilai berita. Nilai – nilai berita tersebut yaitu dekat dengan khalayak, berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, menyangkut angka statistik yang besar, menyangkut orang – orang yang terkenal, aktual, dan menyangkut hal – hal yang luar biasa, atau kejadian orang yang menyentuh perasaan (membuat orang terharu). (Winarko,2000:9-16).

Selain memiliki nilai berita, dalam berita juga terkandung di dalamnya makna kebaruan, dan kebaruan yang diolah puluhan dan ratusan media massa sendirinya berkompetensi dalam menyampaikan kebaruan tersebut. (Oetama, 2001:110)

Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Salah satu tugas wartawan adalah mencari, menulis, dan menyajikan berita. Banyak cara dalam memberitakan sebuah berita, misalkan dengan gaya *'to the point'*, langsung pada pokok persoalan yakni *straight news*, sedangkan berita yang disampaikan tidak langsung arti dibumbui kata-kata sehingga fakta yang tampaknya sepele menjadi

menarik untuk diminati dan dinikmati, jenis ini disebut *features news*. Namun, membumbui kata-kata bukan berarti menghilangkan faktanya, tetapi fakta adalah landasan untuk berkisah. (Tamburaka, 2012:135)

Wartawan memang harus membuat tulisannya menarik, tetapi dengan tidak menjuruskan, mewarnai, atau memainkan kata-kata. Berita itu sendiri sebenarnya sudah mempunyai warna. Warna inilah yang harus diangkat ke permukaan, yaitu berupa detail. Untuk membuat atau mendapatkan berita yang baik, maka diperlukan kriteria nilai berita (*news value*). Nilai berita menjadi acuan bagi para jurnalis/wartawan/reporter, bahkan editor untuk memutuskan fakta yang lebih pantas menjadi berita, dalam memilih kelayakan berita.

2.4 Teori Hirarki Pengaruh Media

Teori hirarki pengaruh isi media dalam bukunya diperkenalkan oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media (individual level), pengaruh dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi media (organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang terakhir adalah pengaruh ideologi (ideology level). (Shoemaker, 1996:60)

Asumsi dari teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu

wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. (terinspirasi komunikasi.com)

Stephen D. Reese mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya.

Dari teori ini kita akan melihat seberapa kuat pengaruh yang terjadi pada tiap-tiap level. Walaupun level organisasi media atau faktor kepemilikan sebuah media tapi kita tidak bisa mengesampingkan faktor yang lainnya karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Contohnya pengaruh level ideologi yang terjadi pada sebuah isi sebuah media, walaupun dianggap abstrak tapi sangat mempengaruhi sebuah media karena bersifat tidak memaksa dan bergerak di luar kesadaran keseluruhan organisasi media itu sendiri. (terinspirasi komunikasi.com)

2.5 Konstruksi Realitas Pemberitaan dalam Media Massa

Hal yang tak kalah penting dalam membuat berita adalah bagaimana mengemas berita tersebut atau dengan kata lain *framing*, bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya kurang baik maka isu yang baik itu akan kurang menarik, bahkan pesan yang ingin disampaikan barangkali kurang

mengena atau bias. Maka berita itu harus dikonstruksi sedemikian rupa, agar konstruksi pesan dapat dimaknai oleh audiens.

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman dalam buku *the social of construction reality*. Realitas menurut Berger tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan di konstruksi. Dengan pemahaman ini realitas, pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing individu. (Eriyanto, 2012:18)

Lebih lanjut gagasan Berger mengenai konteks berita harus dipandang sebagai konstruksi atau realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksikan secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat bagaimana wartawan mengkonstruksikan peristiwa dalam pemberitaannya.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang *real*. Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta, realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita tetapi melalui proses. Diantaranya proses interaksi dimana wartawan dilanda oleh realitas yang ia amati dan diserap dalam kesadarannya, kemudian diproses selanjutnya adalah eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dan proses interkasi dan dialektikal ini. (Eriyanto, 2012:18)

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis :

1. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas

politik, kata makna itu sendiri menunjuk kepada sesuatu yang diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa. Makna bukanlah suatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu peran.

2. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang terus-menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukanlah sesuatu yang netral. Perhatian justru lebih ditekankan pada sumber dan khalayak. Pendekatan konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. (Bungin, 2008:167)

Terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media, khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas, termasuk realitas politik, yang berujung pada pembentukan citra sebuah kekuasaan politik:

- 1) Pemilihan simbol (fungsi bahasa)

Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tetapi telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan simbol politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melalui lambang politik. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya. (Hamad, 2004:16)

2) Pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi *framing*)

Sasaran dari analisis *framing*, sebagai salah satu metode analisis wacana adalah menemukan “aturan dan norma” yang tersembunyi dibalik sebuah teks. Teknik ini digunakan untuk mengetahui perspektif atau pendekatan yang digunakan sebuah media dalam mengkonstruksikan sebuah peristiwa. (Hamad, 2004:23)

3) Kesiediaan memberi tempat (agenda setting)

Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan khalayak. Tesis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah issue amat tergantung seberapa besar media memberikan perhatian besar pada issue tersebut. Bila satu media apalagi sejumlah media menaruh sebuah kasus sebagai *head-line* diasumsikan kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. (Hamad, 2004:23-24)

Kraus dan David (Hamad, 2004:24-25) mengelompokkan cara media mengkonstruksikan realitas politik ke dalam lima cara: pencitraan, pembuatan realitas komunikasi, penganugerahan status, pembuatan peristiwa buatan, dan agenda setting. Menurut mereka, kelima cara ini bukan hanya berpengaruh terhadap citra para aktor politik namun juga memengaruhi perilaku politik para aktor dan khalayak.

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi

Positivis	Ada fakta yang “riil” yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal.
Konstruksionis	Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.

2. Media adalah agen konstruksi

Positivis	Media sebagai saluran pesan.
Konstruksionis	Media sebagai agen konstruksi pesan.

3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas

Positivis	Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Karena itu berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput.
Konstruksionis	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.

4. Berita bersifat subjektif/konstruksi atas realitas

Positivis	Berita bersifat objektif: menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.
Konstruksionis	Berita bersifat subjektif: opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan

	perspektif dan pertimbangan subjektif.
--	--

5. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi

Positivis	Wartawan sebagai pelapor.
Kontruksionis	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.

6. Etika pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita

Positivis	Nilai, etika, opini, dan pilihan moral berada diluar proses peliputan berita.
Kontruksionis	Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.

7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian

Positivis	Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada diluar proses penelitian.
Kontruksionis	Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.

8. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita

Positivis	Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita.
-----------	---

Kontruksionis	Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.
---------------	---

(Eriyanto, 2012: 21-41)

Untuk sebagian orang, media massa dianggap hanya berupaya menemukan kebenaran dan kenyataan itu. Lalu memberitakan kepada publik. Media massa tampaknya tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam dirinya sendiri. Kemudian bagi sebagian orang lagi, media massa tidak pernah tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau kenyataan “apa adanya”. Media massa tidak menunggu peristiwa lalu mengejar, memahami kebenarannya dan memberitakannya kepada publik. Ia mendahului semua itu. Ia menciptakan peristiwa. Menafsirkan dan mengarahkan terbentuknya kebenaran. Tidak selalu untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu secara setia dan terkontrol.

2.6 Analisis *Framing Model Robert N. Entman*

Salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara yang digunakan media massa membangun konstruksi atas sebuah realitas adalah dengan *framing*. Menurut Sobur, “analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media membingkai atau mengemas isu atau peristiwa melalui teks yang terdapat dalam isi media”. *Framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. (Sobur, 2012:161)

Pada perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring

interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menuliskan berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2002:79).

Robert N. Entman adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar analisis *framing* untuk studi isi media. Konsep *framing* oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.

Entman mengkonsepsikan dua aspek penting dalam *framing*:

Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan kepada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain (Eriyanto, 2002:81).

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu penempatan yang menyolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap symbol budaya, generalisasi simplifikasi dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Prinsip analisis *framing* menyatakan bahwa terjadi proses seleksi dan penajaman terhadap dimensi-dimensi tertentu dari fakta yang terberitakan dalam media. Fakta tidak ditampilkan secara apa adanya, namun diberi bingkai (*frame*) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik (Eriyanto, 2002:81).

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pendefinisian masalah, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana. Untuk mendeskripsikan model analisis Robert N. Entmant dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.5.1

Model Framing Robert N. Entmant

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk mendelegitimasi suatu tindakan?</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu?</p>

1. *Defining Problems* atau definisi masalah adalah elemen pertama kali dapat kita lihat dalam analisis *framing*. Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai paling utama. Di tahapan inilah awal berita dikonstruksi sehingga dalam sebuah berita diteliti apakah yang menjadi pokok masalah terhadap sebuah isu, wacana atau peristiwa yang diliput, diberitakan dan peristiwa dipahami oleh wartawan.
2. *Diagnose Causes* atau memperkirakan sumber masalah adalah bagaimana sebuah media membungkus siapakah aktor atau pelaku yang menyebabkan sebuah masalah timbul. Di sini penyebab bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga aspek siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.
3. *Make Moral Judgement/Evaluation* atau keputusan moral adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen atas pendefinisian masalah yang telah dibuat, ketika masalah dan penyebab

masalah telah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

4. *Treatment Recommendation* atau menekankan penyelesaian merupakan elemen *framing* yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Sebuah pesan moral baik secara eksplisit atau implisit bagaimana seharusnya sebuah masalah atau peristiwa itu diselesaikan, ditanggulangi, diantisipasi dan dihindari. (dalam Eriyanto, 2002: 221-227)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks media yakni analisis *framing*. Analisis *framing* dalam penelitian komunikasi massa dapat ditempatkan di satu tempat antara analisis wacana dan analisis isi, biasanya menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Neundorf, dalam Jansen,2010:27).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, walaupun demikian metode kuantitatif juga digunakan pada kajian awal penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Proses dan makna (perspektif subjek/peneliti) lebih ditonjolkan dalam penelitian. (Kriyanto, 2006:57). Kuantitatif di sini dilakukan oleh peneliti pada tahapan awal analisis isi tekstual terhadap teks – teks berita yang dicermati untuk melihat penyeleksian isu serta penonjolan aspek tertentu.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis *framing*. *Framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Analisis *framing* melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan oleh media. (Eriyanto, 2011 :76)

Model *framing* yang peneliti gunakan dalam menganalisis *tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK* adalah model Robert N. Entman. Konsep *framing* oleh

Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto, 2002: 77)

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan, maka kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konseptual menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tepat pada tanggal 21 Oktober 2017 Presiden Jokowi-Jk genap tiga tahun menjalankan roda pemerintahan. Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Survei yang dilakukan Center For Strategic and International Studies atau CSIS mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 2017 mencapai 68,3 persen. Program

infrastruktur yang mulai menampakkan hasil mendominasi dan menjadi indikator kepuasan tersebut. Ketika survey kepuasan masyarakat pada sektor pembangunan mengalami kenaikan, penanganan kegaduhan sosial dan politik malah mendapatkan rapor merah. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, pada era Jokowi-JK, kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkeyakinan justru meningkat. Pasal-pasal terkait dugaan makar, penodaan agama, dan pencemaran nama baik jauh meningkat dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono .

- 2) Pembingkai Media, adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, *Framing* adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
- 3) Majalah Gatra merupakan salah satu media massa nasional yang sudah ada sejak zaman orde baru hingga kini. Embrio majalah Gatra berkaitan dengan pembredelan terhadap majalah Tempo pada tanggal 21 Juni 1994. Akibat pembredelan tersebut, para awak tempo memunculkan alternatif untuk menerbitkan majalah dengan format baru. Awal berdirinya majalah Gatra pada tanggal 19 November 1994 menuai pro-kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat corong pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap

merupakan simbol kekuasaan pemerintah orde baru karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. (Amal, 2010:55-56). Majalah gatra pada saat momentum tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian khusus terlihat dari adanya 50 berita tentang hal tersebut dalam satu edisi terbitan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel peneliti sehingga dengan benar apa yang akan menjadi kategorisasi didalam penelitian dan untuk menganalisa dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian “Pembingkaiian Berita Media Massa Nasional (Analisis *Framing* Berita Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk di Majalah Gatra)” adalah sebagai berikut:

1. Pembingkaiian berita, bagaimana media massa nasional membingkai pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk.
2. Media massa nasional, bagaimana Majalah Gatra membingkai berita mengenai tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada isu SARA dan kebebasan berpendapat

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten untuk mengetahui tentang informasi. Tetapi karena penelitian ini merupakan penelitian analisis *framing* maka narasumber dalam penelitian ini adalah berita-berita yang diterbitkan oleh majalah gatra dalam edisi

khusus tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada isu SARA dan kebebasan berpendapat sebanyak 4 berita.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi berasal dari kata *documen*, yang berarti barang-barang tertulis. Menurut Gunawan (2013: 178) dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi dan data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Data unit analisis dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis pada majalah Gatra yang memuat berita *Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum*. Berita-berita yang terkait kemudian dikliping, ditabulasikan dan selanjutnya dilakukan analisis data.

TABEL 3.6.1

Contoh Tabel Daftar Berita Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk terkait dengan Politik dan Penegakan Hukum

No	Judul Berita	Rubrik	Tanggal
1.	Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik	Dinamika Politik	25 Oktober 2017
2	Meredam Pilkada Rasa Sara	Pilkada Tantangan Isu Sara	25 Oktober 2017
3	Lugas Menindak Ormas Bablas	Menjaga Konsensus Nasional	25 Oktober 2017
4	Menghidupkan Spirit Pancasila	Menjaga Konsensus Nasional	25 Oktober 2017

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu menganalisis data yang berhasil dikumpulkan oleh si peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. (Krisyantono, 2008:58)

Pada penelitian ini data atau berita yang telah dikumpulkan, diuraikan dan diidentifikasi dengan berpedoman pada model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dari hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menemukan *media package* yang digunakan dalam mengkonstruksi fakta menjadi wacana media dengan menggunakan perangkat Robert N. Entman.

Penguraian dan identifikasi berita pada penelitian ini disederhanakan dalam dua tahap analisis. Tahapan yang dimaksud adalah:

- a. Metode analisis isi tekstual secara konvensional kuantitatif untuk mengetahui isu-isu yang dianggap menonjol yang membantu dalam pemilihan berita yang akan dikonstruksi. Pada penelitian ini kategorisasi yang digunakan peneliti adalah, berdasarkan jumlah paragraf, posisi berita, narasumber, dan isu yang menonjol dalam berita. Kuantifikasi ini dimaksudkan untuk kelengkapan data yang akan digunakan dalam tahapan analisis isi tekstual.

TABEL 3.7.1

Contoh Tabel Jumlah Paragraf

No	Jumlah Paragraf	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	≤ 10		
2	11-15		
3	16-20		
4	21-25		
5	≥ 26		

TABEL 3.7.2

Contoh Tabel Posisi Berita

No	Posisi Berita	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	<i>Headline</i>		
2	Halaman depan bukan <i>headline</i>		

3	Halaman tengah		
4	Halaman belakang		

TABEL 3.7.3

Contoh Tabel Narasumber

No	Narasumber	Frekuensi (F)	Persentase (%)
2	Menteri Dalam Negeri		
3	Pengamat Politik		
4	Lembaga Survey		
5	Anggota Dewan		

TABEL 3.7.4

Contoh Tabel Isu-Isu yang Menonjol

No	Isu-Isu Yang Menonjol	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1			
2			

- b. Analisis *framing* model Robert N. Entman. Objek penelitian akan diteliti satu per satu. Pertama isi berita dan sumber berita akan dijelaskan pada tabel. Kedua setiap berita akan diuraikan setiap *frame* untuk melihat bagaimana kecenderungan konstruksi berita tersebut dengan acuan model Robert N. Entman.

TABEL 3.7.5**Contoh Tabel Berita yang Diteliti**

Judul Berita	Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik
Halaman	93
Tanggal Terbit	25 Oktober 2017

TABEL 3.7.6**Contoh Tabel *Frame* Isi Pemberitaan**

<i>Define Problems</i> (Pendefenisian masalah)	
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti tidak memiliki lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan jenis dari penelitian yang dikerjakan yang merupakan analisis.

Sedangkan waktu dalam penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari Bulan Januari 2018 hingga Maret 2018

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Majalah Gatra

Embrio Majalah Gatra berkaitan dengan pembredelan terhadap majalah Tempo pada tanggal 21 Juni 1994. Efek dari pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah membawa konsekuensi penutupan majalah Tempo dari penerbitan. Pada bulan Desember 1995, keluar pembatalan SIUP Tempo bernomor 025/SK/Menpen/SIUP/CI/1985 yang mengeksekusi PT. Grafiti Press, selaku penerbit Tempo untuk berhenti beroperasi. Pembatalan SIUP tersebut kemudian memunculkan alternatif untuk menerbitkan majalah dengan format baru. Untuk menganggapi kondisi tersebut, para awak Tempo mempunyai opsi melawan pembredeilan dengan konsekuensi berhadapan dengan pemerintah, atau menerima pembredeilan dan kemudian mendirikan majalah baru. Para awak Tempo sebagian besar memilih opsi kedua dengan menerbitkan majalah Gatra pada 19 November 1994 bersamaan dengan konferensi APEC di Jakarta (Purba,2016:44).

Awal berdirinya majalah Gatra menuai pro kontra. Beberapa kalangan melihat, majalah Gatra merupakan alat corong pemerintah untuk mengatur pemberitaan, Gatra juga dianggap merupakan simbol kekuasaan pemerintah karena didanai oleh Bob Hasan yang dekat dengan pemerintah saat itu. Kondisi tersebut memunculkan pemboikotan terhadap Gatra. Pemboikotan tersebut meliputi, penolakan dari beberapa narasumber berita untuk diwawancarai maupun

kontributor untuk memberikan tulisan dalam majalah Gatra. Sedangkan pihak yang pro Gatra menganggap kemunculan Gatra merupakan kehendak sejarah setelah majalah Tempo dibredel oleh pemerintah (Purba,2016:44).

Tokoh yang memprakarsai terbitnya majalah Gatra diantaranya Herry Komar, Mahtum Mastum, Lukman Setiawan, Harijoko Trisnadi, dan Budiono Kartohadiprodjo. Herry Komar, seorang jurnalis Indonesia. Ia bekerja di majalah Tempo sebagai redaktur eksekutif hingga Tempo dibredel pada tahun 1994. Ia kemudian mendirikan majalah Gatra pada tahun yang sama dan menjadi pemimpin redaksinya. Pada tahun 1998, bersama sejumlah rekannya ia keluar dari Gatra dan mendirikan majalah baru bernama Gamma. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di majalah tersebut, namun Gamma terpaksa tutup tidak lama kemudian karena kalah bersaing dengan media sejenis lainnya. Sedangkan Budiono Kartohadiprodjo, menjadi direktur pada PT. Era Media Informasi yang menerbitkan majalah Gatra (Purba,2016:45).

4.1.2 Visi dan Misi Majalah Gatra

Slogan baca Gatra baru bicara, merupakan suatu bentuk tagline serta komitmen Gatra untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca setianya. Wujud dari komitmen tersebut juga tertera dalam visi dan misi majalah Gatra, yaitu:

- Visi: Membangun Industri informasi menuju masyarakat yang cerdas, berakhlak, dan sadar terhadap hak dan kewajibannya, serta mendorong tegaknya hukum yang berkeadilan, menjadi rujukan informasi bagi masyarakat global.

- Misi :
 - 1) Menyajikan produk informasi yang terpercaya, mencerdaskan, objektif, akurat, jujur, jernih, berakhlak, dan berimbang
 - 2) Meningkatkan hasil usaha dengan cara yang sehat, adil, efisien, dan efektif, inovatif, tumbuh dan disegani dalam bisnis global
 - 3) Meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pembaca
 - 4) Memimpin pasar media nasional dengan cakupan global dalam industri media cetak dan elektronik.

(Purba,2016:45).

4.1.3 Struktur Pemberitaan

Struktur pemberitaan majalah Gatra memprioritaskan berita politik, ekonomi, hukum, bisnis, dan sosial. Sedangkan berita hiburan yang sifatnya lifestyle, olahraga, kesehatan, menempati porsi sekunder. Sebagai majalah berita, dalam menampilkan pemberitaan, Gatra mengkombinasikan unsur aktualitas peristiwa mingguan dengan peliputan mendalam (indepth coverage) dan penulisannya dengan bentuk feature. Struktur pemberitaannya meliputi laporan utama yang merupakan perhatian Gatra terhadap sebuah peristiwa mingguan tertentu, laporan khusus sebagai kaitan laporan utama atau berita penting mingguan lainnya, berita ekonomi yang mengulas perkembangan ekonomi makro maupun mikro, bisnis, kemudian ragam dan olahraga yang merupakan komplementer (Purba,2016:46).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Isi Tekstual

Berdasarkan teknik analisis data yang telah ditentukan oleh peneliti, maka berita yang telah terkumpul akan dijadikan unit analisis dengan melakukan *koding* dan seleksi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan untuk mengetahui isu-isu yang dianggap menonjol yang membantu dalam pemilihan berita yang akan dikonstruksi.

Kategori tersebut antara lain:

a. Jumlah Paragraf

Jumlah paragraf menggambarkan keseriusan media dalam mengulas sebuah topik dalam pemberitaannya. Pada penelitian ini berita dibagi berdasarkan jumlah paragraf yang diberi rentang, ≤ 10 , 11-15, 16-20, 21-25, ≥ 26

b. Posisi Berita

Penempatan berita pada setiap bagian surat kabar bukan hal yang terjadi tanpa sebab. Posisi sebuah berita memiliki nilai tersendiri. Posisi berita pada penelitian ini dibagi berdasarkan halaman, yaitu headline, halaman depan bukan headline, halaman tengah, dan halaman belakang.

c. Narasumber

Pemilihan narasumber merupakan hal penting dalam penulisan satu berita. Pemilihan dilakukan berdasarkan isu yang akan ditonjolkan oleh media dalam berita tersebut. Penggolongan narasumber dalam penelitian ini adalah menteri dalam negeri, anggota dewan, lembaga survei dan pengamat politik.

d. Isu yang Ditonjolkan

Pembagian berita berdasarkan isu yang ditonjolkan dalam sebuah berita disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Terkait dengan pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk pada majalah Gatra dilihat bagaimana penonjolan isu terkait hasil kerja bidang politik dan penegakan hukum Jokowi-Jk.

Pada tabel dibawah ini peneliti menyajikan profil berita yang akan diteliti berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu jumlah paragraf, jenis berita, posisi berita, narasumber, dan isu-isu yang ditonjolkan.

TABEL 4.2.1
Profil Berita yang Diteliti

No	Judul Berita	Jumlah Paragraf	Posisi Berita	Rubrik
1	Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik	27	Halaman Belakang (93-95)	Dinamika Politik
2.	Meredam Pilkada Rasa Sara	28	Halaman Belakang (99-101)	Pilkada
3.	Lugas Menindak Ormas Bablas	23	Halaman Belakang (Hal. 123-125)	Menjaga Konsensus Nasional

4.	Menghidupkan Spirit Pancasila	16	Halaman Belakang (Hal. 126-127)	Menjaga Konsensus Nasional
----	-------------------------------	----	------------------------------------	----------------------------

Catatan : Total jumlah halaman Gatra edisi khusus adalah 139 halaman

TABEL 4.2.1

Profil Berita yang Diteliti

No	Judul Berita	Isu yang Ditonjolkan	Sumber Berita
1.	Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik	Pemerintah tidak tegas dalam penegakan hukum, Pemerintah tidak anti kritik	Pengamat Politik, Menteri Dalam Negeri
2.	Meredam Pilkada Rasa Sara	Pemerintah masih belum mampu untuk meredamkan isu SARA di masyarakat.	Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Direktur Eksekutif & Peneliti Politik Indikator Politik Indonesia, Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
3.	Lugas Menindak Ormas Bablas	Penerbitan Perppu Ormas wujud	Anggota Komisi II DPR, Wakil Ketua

		ketegasan Pemerintah menindak ormas anti Pancasila	Umum Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri, Indikator Politik Indonesia, Analisis Komunikasi Politik Universtas Paramadina
4.	Menghidupkan Spirit Pancasila	Pemerintah bentuk lembaga pembinaan ideologi Pancasila untuk menghindari potensi ancaman terhadap pancasila.	Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Pengamat Politik

4.2.1.1 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Jumlah Paragraf

Dari profil berita di atas, kemudian dilakukan pendataan frekuensi berdasarkan kategori yang telah ditentukan peneliti dan akan dilakukan analisis sesuai kategori.

TABEL 4.2.2
Jumlah Paragraf

No	Jumlah Paragraf	Frekuensi (f)	Persentase
1	≤ 10	0	0%
2	11-15	0	20%
3	16-20	1	25%
4	21-25	1	25%
5	≥ 26	2	50%

Tabel di atas menjelaskan bahwa porsi pemberitaan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK terkait bidang politik dan penegakan hukum yang membahas isu SARA dan kebebasan berpendapat dalam majalah Gatra cukup mengulas. Hal ini tampak dari penggunaan jumlah paragraf dari empat berita yang diteliti, ada dua berita berjumlah ≥ 26 paragraf yang berjudul *Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik* dan *Meredam Pilkada Rasa Sara*. Dua berita ini mewakili kinerja pemerintah bidang Politik. Sedangkan untuk bidang penegakan hukum, seperti *Lugas Menindak Ormas Bablas*, majalah Gatra menyajikan ulasan pada rentang 21-25 paragraf dan untuk kolom wawancara bersama Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal menjaga konsensus nasional, majalah Gatra hanya menggunakan 16 paragraf saja.

Penggunaan jumlah paragraf tersebut tentu akan berpengaruh terhadap penting atau tidak pentingnya berita tersebut kepada khalayak. Penyediaan informasi yang akurat dan juga mendalam oleh media dapat diukur dari jumlah

paragraf yang digunakan. Berita yang dianggap penting oleh media tentunya akan memuat informasi yang akurat dan mendalam serta dituliskan dalam paragraf yang relatif panjang dikarenakan muatan isi berita tersebut. Hal ini cukup ditunjukkan oleh majalah Gatra, dapat dilihat jumlah paragraf dari keempat berita tersebut didominasi pemberitaan dengan jumlah paragraf diatas 16 paragraf. Meskipun jika dilihat, frekuensi jumlah berita yang disajikan terkait masalah politik dan penegakan hukum hanya berjumlah 11 berita dari 30 pemberitaan yang ada pada edisi khusus Gatra kali ini. Kemudian dari 11 pemberitaan tersebut, ditemukan yang mengulas seputar isu kebebasan berbicara, SARA hanya berjumlah 4 berita saja.

4.2.1.2 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Posisi Berita

TABEL 4.2.3

Posisi Berita

No	Posisi Berita	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	<i>Headline</i>	0	0%
2	Halaman Depan bukan <i>Headline</i>	0	0%
3	Halaman Tengah	0	0%
4	Halaman Belakang	4	100%

Pada penempatan halaman berita, majalah Gatra menempatkan ke-empat berita terkait bidang politik dan penegakan hukum yang berfokus pada kinerja pemerintah dalam menghadapi isu SARA, kebebasan berpendapat dan isu konsensus nasional yang terletak pada halaman belakang. Keseluruhan berita pada

halaman belakang tidak pada posisi berurutan. Karena diantara rubrik yang membahas isu tersebut, disisipi dengan info dari kementerian, kolom, dan juga berita terkait pembangunan yang dilakukan Jokowi-Jk. Hal ini mempengaruhi tata letak halaman pada tiap rubrik dan sub-rubrik pada majalah Gatra.

Penempatan halaman satu berita dipengaruhi oleh tingkat kepentingan satu berita tersebut. Pada penyusunan berita model piramida terbalik, semakin mengerucut ke bawah menjelaskan bahwa berita tersebut memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Berita mengenai politik dan penegakan hukum dalam model ini berada pada tingkat terendah. Majalah Gatra dalam menempatkan halaman satu berita dapat dikategorikan menggunakan model piramida terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi majalah Gatra, berita mengenai politik dan penegakan hukum yang berfokus pada kinerja pemerintah dalam menghadapi isu SARA, kebebasan berpendapat dan isu konsensus nasional tidak begitu penting.

4.2.1.4 Analisis Isi Tekstual berdasarkan Narasumber

TABEL 4.2.4

Narasumber

No	Narasumber	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Menteri Dalam Negeri	3	21%
2	Anggota Dewan	2	14%
3	Pengamat Politik	4	29%
4	Lembaga Pemerintah	1	7%
5	Lembaga Survey	4	29%

Adapun narasumber yang dipilih oleh majalah Gatra adalah Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Tjipta Lesamana (Pengamat Politik), Rustika Herlambang (Direktur Komunikasi Indonesia Indicator), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Djayadi Hanan (Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting), Virdika Rizky Utama (Peneliti Politik Indikator Politik Indonesia), Mardani Ali (Anggota Komisi II DPR), Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR), Hendri Satrio (Analisis Komunikasi Politik Universitas Paramadina), Yudi Latif (Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila), Siti Zuhro (Pengamat Politik), Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia, Data Kementerian Komunikasi dan Infromasi, Lembaga Survey Saiful Mujani Research and Consulting, Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survey Indonesia Indicator.

Berdasarkan tabel diatas, Gatra terlihat mengakomodasi pernyataan-pernyataan pihak terkait dan juga Gatra turut menyertakan hasil dari lembaga survey untuk menganalisis kinerja pemerintah selama tiga tahun pemerintahannya. Pemilihan narasumber yang mengkritik dan turut memberikan ruang kepada pemerintah selaku pihak penyelenggara berguna untuk menjaga keseimbangan dalam penulisan berita tersebut. Kehadiran narasumber yang kredibel memiliki peran yang sangat penting dalam isu yang diberitakan. Beragamnya narasumber dalam satu berita berguna untuk menjaga keseimbangan dalam penulisan berita.

4.2.1.4 Analisis Isi Tekstual Berdasarkan Isu yang Ditonjolkan

TABEL 4.2.5**Isu yang Ditonjolkan**

No	Isu yang Ditonjolkan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Isu Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	3	50%
2	Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)	1	17%
2	Isu komitmen pada konsensus nasional seputar Pancasila	2	33%

Isu-isu yang ditonjolkan dalam berita tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum, majalah Gatra mengambil fokus pada sikap pemerintah dalam menyikapi isu yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, SARA, dan juga isu konsensus nasional yang memang sedang berkembang di masyarakat. Isu tersebut dikembangkan majalah Gatra dengan mengaitkannya pada beberapa kasus yang terjadi dan menyajikan bagaimana dampaknya pada pemerintah dan masyarakat melalui hasil survey dan hasil amatan pengamat politik.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari empat berita yang diteliti, Gatra menaruh porsi yang lebih banyak dalam menonjolkan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan persentase 50%. Hal ini dilihat dari setiap judul pemberitaan, Gatra cenderung menempatkan informasi isu kebebasan berpendapat dalam konteks yang khas sehingga terlihat sisi ini mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain.

4.2.2 Analisis Framing

Sesuai dengan yang telah ditentukan peneliti sebelumnya pada bab III, setelah dilakukan analisis teks konvensional maka dilakukan analisis *framing*. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *framing* model Robert N. Entman. Berita yang akan dianalisis adalah empat berita terkait bidang politik dan penegakan hukum yang juga dianalisis sebelumnya menggunakan analisis teks konvensional. Analisis *framing* ini diharapkan dapat menggambarkan konstruksi berita – berita pada majalah Gatra terkait *tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk* terkait bidang politik dan penegakan hukum.

4.2.2.1 Analisis Framing Berita 1

TABEL 4.2.6

Karakteristik Majalah

Tanggal Terbit	19-25 Oktober 2017
Halaman	92-95
Judul Berita	Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik

Defenisi Masalah (*Define Problem*)

Defenisi masalah merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat oleh wartawan akan memengaruhi penulisan dan sudut pandang berita. Hal ini jugalah yang digunakan wartawan Gatra dalam menuliskan berita *Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kririk*. Pada pemberitaan ini, majalah Gatra memandang selama periode tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah dilihat sebagai pemimpin yang tidak tegas dalam penegakan hukum dan semakin mengekang kebebasan

berpendapat masyarakat. Hal ini dapat langsung dilihat pada lead yang digunakan Gatra saat mengawali beritanya.

“Kebebasan berpendapat hanyalah salah satu bagian demokrasi. Presiden harus lebih berani dalam menegakan hukum. Teman terbaik adalah mereka yang menyampaikan kritik demi kebaikan. Mengapa Pemerintah takut terhadap Saracen?”

Frame kemudian dikembangkan oleh Gatra pada awal paragraf berita dengan menjelaskan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Gatra juga turut memaparkan serangkaian peristiwa penersangkaan terhadap pihak yang mengkritisi atau berseberangan dengan pemerintah seperti kasus ujaran kebencian Jonru Ginting, kasus Saracen, hingga kasus tuduhan makar yang ujungnya tidak mendapatkan kepastian hukum.

“Masyarakat yang terbelah menandai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka yang pro dan kontra pemerintah saling melaporkan kepada polisi. Peristiwa teranyar adalah penangkapan Jonru Ginting. Postingannya di media sosial kerap mengkritisi, kalau tidak mau dibilang menyinyiri pemerintah. Sebelum Jonru, kelompok Saracen juga dibekuk polisi. Kelompok ini kerap mem-posting tulisan yang menjelek-jelekkan Pemerintah. “

“Pada saat heboh demokrasi berlabel cantik, seperti 411 dan 212, sejumlah aktivis ditangkap dengan tuduhan makar. Namun, begitu ditorsangkakan, ujungnya tidak jelas. Para pemakar malah dibiarkan melenggang bebas. Hasil pemerikasaan pun terkesan ditutupi atau dirahasiakan, tidak transparan.”

“Menurut Tjipta Lesmana, ada yang menarik saat Presiden menanggapi aksi demo yang dipimpin Habib Rizieq. “Sayangnya, aksi-aksi itu telah diboncengi sejumlah politisi.” Karena yang menyampaikan adalah Presiden, kata Tjipta, rakyat tentu menilai hal itu benar, tidak ada unsur kebohongan apalagi fitnah. Tapi sayangnya hal tersebut tidak ada kelanjutannya.”

Gatra turut mengembangkan isu ini dengan mendefenisikan masalah lewat pernyataan dari pengamat politik, Tjipta lesamana, yang melihat bahwa ada

indikasi pemerintahan Jokowi bergulir ke ranah otoritarian atau *dictatorship* berdasarkan sikap Pemerintah yang terlihat semakin anti kritik.

“Terkait dengan sikap Pemerintah yang terlihat semakin antikritik, Tjipta mengamatinya sebagai indikasi kearah diktator atau otoritarian. Menurut teori, Pemerintah yang alergi kritik dan marah jika dikritik, mengindikasikan bahwa roda pemerintahannya bergulir ke ranah otoritarian.”

“Saya khawatir pemerintahan Jokowi sudah mulai bergulir kesana.”

Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (*Diagnose Causes*)

Majalah Gatra memperkirakan yang menjadi sumber masalah dalam pemberitaan ini adalah berasal dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tidak memiliki keberanian dan ketegasan serta terkesan mendapat pengaruh dari orang-orang dilingkaran Jokowi. Gatra menilai bahwa pemerintah seharusnya menjadi aktor kunci yang memegang peranan dalam mewujudkan ketertiban serta keamanan rakyat Indonesia sehingga intervensi yang diberikan dari pihak manapun tidak mengganggu fokus kerja Jokowi. Hal ini dapat dilihat dari penyajian berita Gatra yang menyajikan pernyataan dari narasumber terkait isu yang ditonjolkan yang sesuai dengan pandangan Gatra. Gatra masih mengambil pernyataan dari narasumber yang sama yaitu Tjipta Lesamana, pengamat politik sekaligus Profesor yang mengajar di Universitas Budi Luhur.

“Salah satu kelemahan terbesar Jokowi adalah orang-orang di lingkaran Jokowi. Ring satu Jokowi ditempati orang-orang yang punya kepentingan, pengusaha-pengusaha besar. “Pak Jokowi tidak punya keberanian untuk melawan orang-orang di ring satu itu. Padahal dia tau persis yang ingin menjegalnya. Jokowi suka lupa atau memang, maaf, penakut. Dia lupa bahwa dia Presiden RI, kepala negara,”tegasnya.

“Ini termasuk titik lemah pemerintahan Jokowi di bidang penegakan hukum. Terlalu banyak mulut. Lelet, lambat sekali. Dari awal sejak bulan Juli Polri sudah menemukan tersangkanya. Prosesnya lama. Makanya hoax juga tambah hebat.”

Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)

Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan itu. Membuat keputusan moral dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat.

Memberikan keputusan moral berdasarkan fakta dari sumber berita yang kredibel membuat pembaca akan memiliki persepsi yang sama dengan Gatra. Adapun keputusan moral yang diberikan pada pemberitaan ini adalah pemerintah masih memiliki banyak kelemahan dari sisi penegakan hukum namun bukan berarti mengancam kebebasan berpendapat rakyatnya.

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan teks berita Gatra yang cenderung menyudutkan pemerintah dalam hal kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum tersebut. Terlihat dari penonjolan isu yang dituliskan secara berulang-ulang. Namun, terkait isu yang menyatakan pemerintah antikritik, Gatra menyajikan fakta dari dua narasumber sebagai pembanding yaitu dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan pengamat politik Tjipta Lesamana yang sudah memberikan pernyataannya dari awal berita.

Menurut Tjipta perlu dipahami terlebih dahulu konsep demokrasi, yang kerap disalahartikan anak muda. Demokrasi bukan hanya ‘kebebasan mengemukakan pendapat’ atau berekspresi. Demokrasi seperti sebuah bangunan dengan pilar-pilar pendukung.

“Kritik, enggak apa-apa. Saya suka kritik, tapi juga ada batasnya.”

“Tjahyo menyanggah pendapat yang menyebutkan bahwa Pemerintah anti kritik. Pemerintah tidak anti kritik. Pemerintah justru sangat terbuka dan transparan dalam pengelolaan tata kelola pemerintah,”katanya.

Meskipun pada headline pemberitaan Majalah Gatra terlihat menyudutkan pemerintah dengan menyajikan argumen terkait kasus yang belum jelas proses hukumnya disertai penyajian foto Jonru Ginting dan web Saracen, namun dari keseluruhan isi berita ‘Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik’, terlihat bahwa Gatra ingin menutup keseluruhan berita dengan memberikan keputusan moral bahwa pemerintah itu tidak anti kritik, melainkan hanya menjaga ketertiban lewat aksi penangkapan orang-orang yang berbicara kebablasan. Hal ini dapat dilihat dari cara wartawan mengutip kutipan Menteri Luar Negeri saat menutup artikelnya.

Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Penyelesaian yang diberikan oleh Gatra dalam berita ini mengenai sikap pemerintah yang kurang tegas dalam penegakan hukum dan juga terkait isu anti kritik pemerintah adalah pemerintah harus lebih berani dalam menindak pelaku yang menyebarkan kebencian dan fitnah. Dalam pelaksanaan hukumnya pemerintah sebaiknya lebih transparan kepada masyarakat. Banyak landasan hukum seperti KUHP, UU ITE yang dapat digunakan.

Gatra, terkait kebebasan berpendapat, juga meyakinkan pembaca bahwa siapapun dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E untuk bebas mengeluarkan pendapat, mengkritik Presiden, namun diarahkan pada kebijakan dan kinerjanya bukan pada personal dan tidak menyelipkan unsur fitnah ataupun menebar kebencian.

“Pada masa pemerintahan Soeharto, para pelaku diseret ke pengadilan agar masyarakat bisa mengetahui letak kesalahannya, tetapi sekarang tidak. Inilah yang dituntut dari pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu bertindak lebih tegas dan lebih berani dalam penegakan hukum.

“Kritik, sekeras-kerasnya kritik diperbolehkan dan dibenarkan dalam sistem demokrasi. Tapi, jangan masuk ke personal.” ungkap Thahjo. “Kebebasan berpendapat, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu kata Tjahyo, Presiden juga sangat terbuka terhadap kritik. Masyarakat atau siapapun boleh mengkritik Presiden atas kinerja yang diemban pemerintah. “Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian.”

TABEL 4.2.6

FRAME I: Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik

<p><i>Define Problems</i> (Pendefenisian masalah)</p>	<p>Pemerintah dianggap sebagai pemimpin yang anti kritik dan tidak tegas dalam menegakan hukum lewat serangkaian peristiwa penersangkaan terhadap pihak yang mengkritisi atau berseberangan dengan pemerintah yang ujungnya tidak mendapatkan kepastian hukum.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Ketidakberanian dan ketidaktegasan sikap Presiden Joko Widodo serta adanya pengaruh dari orang-orang dilingkaran Jokowi.</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Pemerintah masih memiliki banyak kelemahan dari sisi penegakan hukum namun bukan berarti mengancam kebebasan berpendapat rakyatnya.</p>

<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah harus lebih tegas dan berani 2. Kritik merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada pemerintah 3. Kritik diarahkan pada kebijakan bukan personal 4. Mengkritik diperbolehkan asal tidak dilakukan dengan fitnah ataupun menebar kebencian
--	---

4.2.2.2 Analisis *Framing* Berita 2

TABEL 4.2.7

Karakteristik Majalah

Tanggal Terbit	19-25 Oktober 2017
Halaman	99-101
Judul Berita	Meredam Pilkada Rasa Sara

Defenisi Masalah (*Define Problem*)

Majalah Gatra pada berita ini mendefenisikan masalah dengan menonjolkan isu utama yaitu tentang peningkatan eskalasi dan intensitas penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tiga tahun Pemerintahan Jokowi-Jk dan semakin meningkat tajam saat memasuki Pemilu. Isu ini diceritakan oleh Gatra pada *headline* berita dengan mengaitkan *frame* pada

kasus penistaan agama oleh petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akhirnya ‘tumbang’ pada Pilkada DKI 2017 karena alasan agama.

“Lingkaran Survey Indonesia (LSI) memprediksi isu agama sebagai faktor yang menumbangkan Ahok. Persentase jumlah pemilih muslim yang tak menginginkan gubernur non muslim meningkat dari 40% ke 55% (September 2016).”

“Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, jumlah konten berbau SARA dan ujaran kebencian di dunia maya mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 laporan”

Majalah Gatra memandang kasus ‘keseleo lidah’ Ahok ini berimbas pada dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Gatra menyajikannya lewat hasil survey Indikator Politik Indonesia yang mengakui tentang menurunnya elektabilitas dan mencapai titik terendah di Januari 2017.

Gatra juga mengembangkan *frame* tersebut dengan menyajikan dua foto. Foto pertama menggambarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai dilantik menjadi Gubernur DKI 2017-2022 menggantikan gubernur sebelumnya yaitu Ahok. Foto kedua menggambarkan Ahok yang tiba di rumah tahanan Cipinang, Jakarta.

Penyajian foto dan judul yang menarik oleh Gatra tentu akan membuat pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Hal ini diakibatkan ada makna laten yang ingin ditunjukkan Gatra antara foto dan judul berita yaitu kampanye hitam yang menyentuh isu SARA, dampaknya jauh lebih besar dan masif bagi para calon pemimpin di Indonesia.

Memperkirakan Masalah (*Diagnose Causes*)

Majalah Gatra memandang yang menjadi sumber masalah dalam pemberitaan ini adalah kampanye hitam yang terus terjadi saat Pilkada, sehingga masalah isu SARA ini belum terentaskan secara maksimal. Gatra menyajikan temuan dari lembaga survey yang menyatakan bahwa modus SARA ini sudah muncul sejak 2012 dan semakin mengkhawatirkan.

“Dalam catatan Indonesia Indicator, sejak 2012, kampanye negatif dengan menggunakan isu SARA sudah muncul. Awalnya, pada masa itu, kampanye negatif disebarakan melalui layanan pesan singkat (SMS) dan aplikasi antar pesanan Blackberry (BBM).”

“Hasil riset Indonesia Indicator tentang kampanye hitam di pilkada periode 2012-2017 menunjukkan bahwa isu korupsi dan skandal tidak berpengaruh besar dalam pilkada. Tapi ketika menyentuh SARA, dampaknya jauh lebih besar dan masif.”

Gatra dalam mengembangkan frame ini mengambil kutipan langsung dari narasumber yang berasal dari lembaga survey Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang melihat bahwa isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat lewat Aksi Bela Islam, ribut dugaan makar, hingga menyerempet sosok personal Jokowi, semuanya itu bertujuan untuk melemahkan Jokowi.

“Ada instabilitas politik yang bertujuan melemahkan Jokowi, bukan menjatuhkannya,” papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.”

Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)

Keputusan moral yang dapat ditentukan dalam berita ini adalah bahwa pemerintah masih belum mampu untuk meredamkan isu SARA di masyarakat. Meskipun upaya dan manuver yang dikenal dengan Safari Politik Presiden Jokowi seperti *roadshow* ke kantong-kantong Islam, bertemu dengan elite partai Politik,

TNI, dan Polri sembari membawa pesan kebhinnekaan berhasil menaikkan elektabilitas Jokowi yang sempat menurun akibat imbas dari kasus penistaan agama, namun isu SARA ini masih belum terentaskan secara optimal.

“Kekhawatiran publik terhadap isu SARA belum reda. Indo Barometer menginvertasi lima permasalahan terpenting yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Jk di dua setengah tahun masa kepemimpinannya. Masalah agama dan SARA menempati posisi ketiga dengan 8,3%. Posisi pertama dan kedua dihuni oleh permasalahan perekonomian rakyat 16% dan harga sembako 14,6%.”

“Peneliti politik Indikator Politik Indonesia, Rizka Hilda, menyebut dirinya masih mengkhawatirkan bahwa modus SARA dalam pilkada DKI di kloning ke daerah-daerah lain dalam pilkada serentak 2018 nanti.”

Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Penyebaran isu SARA dalam pilkada yang disebar melalui kampanye hitam menjadi kendala pemerintah dalam menanggulangi isu dan menjaga kedamaian NKRI, untuk itu majalah Gatra menekankan penyelesaian agar para kandidat calon di Pilkada untuk sama-sama menjaga suhu politik. Gatra mengutip solusi dari narasumber peneliti politik, Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida. Hal ini meyakinkan pembaca bahwa seharusnya elite politik tidak menjadikan isu SARA sebagai cara untuk memenangkan Pilkada.

“Ini bisa jadi tantangan untuk elite politik, untuk memenangkan pilkada tanpa SARA,”ujarnya.

TABEL 4.2.7

FRAME II: Meredam Pilkada Rasa SARA

<p><i>Define Problems</i> (Pendefenisian masalah)</p>	<p>Meningkatnya jumlah ujaran kebencian serta konten berbau SARA saat menjelang Pemilu.</p>
---	---

<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>1. Penyebaran isu SARA dalam pilkada yang disebar melalui kampanye hitam menjadi kendala pemerintah dalam menanggulangi isu dan menjaga kedamaian NKRI.</p> <p>2. Instabilitas Politik bertujuan untuk melemahkan Presiden Jokowi</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Pemerintah masih belum mampu untuk meredakan isu SARA di masyarakat, meskipun begitu tingkat kepercayaan dan dukungan publik meningkat.</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p>	<p>Kandidat calon untuk Pilkada agar bersama menjaga suhu politik dan memenangkan Pilkada tanpa SARA</p>

4.2.2.3 Analisis *Framing* Berita 3

TABEL 4.2.8

Karakteristik Majalah

Tanggal Terbit	19-25 Oktober 2017
Halaman	123-125
Judul Berita	Lugas Menindak Ormas Bablas

Defenisi Masalah (*Define Problem*)

Define Problem (defenisi masalah) menekankan bagaimana sebuah peristiwa akan dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami

secara berbeda. Pada pemberitaan ini, majalah Gatra melihat bahwa tindakan tegas pemerintah dalam menerbitkan Perppu ormas sebagai langkah yang tepat. *Frame* ini dikembangkan oleh Gatra pada awal berita paragraf dengan menonjolkan isu kebebasan berekspresi yang kebablasan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas pengusung khilafah, sistem politik yang esensinya bertentangan dengan NKRI dan Pancasila serta menghubungkannya dengan hasil survey tingkat penerimaan dan pengenalan publik terhadap HTI.

“Pernyataan Tjahjo cocok dengan hasil survey nasional evaluasi tiga tahun Jokowi-Jk oleh Indikator Politik Indonesia. Riset ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.220 responden pada 17-24 September lalu. Margin of error-nya 2,9%.”

“Temuan survey ini, 32% publik tahu bahwa Jokowi menerbitkan Perppu Ormas. Dari jumlah yang tahu itu, 75% setuju penerbitan perppu. Sebanyak 29,8% responden mendukung dengan alasan menjaga keutuhan NKRI. Lalu 29,5% menerima atas argument memperkokoh Pancasila dan UUD 1945. Serta 10,8% menilai ini untuk menjaga kerukunan bangsa Indonesia.

“Lalu, 35% tahu kelembagaan HTI. Juga 62% tahu cita-cita HTI mendirikan khilafah. Sebanyak 42% responden yang tahu Perppu setuju bahwa HTI bertentangan dengan Perppu Ormas. Tercatat 12,2 % menilai gerakan ormas itu meresahkan masyarakat.”

Memperkirakan Masalah (*Diagnose Causes*)

Diagnose Causes (memperkirakan masalah) merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa atau siapa. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda pula.

Gatra terkait dengan pemberitaan sebelumnya yang berjudul *Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik*, Gatra menampilkan sumber masalahnya adalah karena sikap pemerintah sendiri yang tidak tegas dalam menegakkan hukum.

Namun, pada berita ini Gatra melihat yang menjadi sumber masalahnya adalah salah kaprah terhadap penggunaan kebebasan berekspresi yang kebablasan sehingga muncul pemikiran radikal yang menyusup di ormas.

“Sebelum ada ISIS, kampanye khilafah digencarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Sudah lama muncul kegelisahan, bagaimana ormas yang esensinya bertentangan dengan Pancasila, sebagai konsensus kebangsaan, dibiarkan leluasa beroperasi. Kebebasan disalahgunakan menjadi kebablasan.”

Kemudian, Gatra juga menyajikan dalam berita ini yang menjadi sumber masalah kedua adalah Perppu Ormas itu sendiri yang dinilai semakin membuat pemerintah lebih otoriter. Hal ini dapat dilihat dari Gatra menyajikan kutipan langsung dari pernyataan Anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali, dan, Fadli Zon yang menilai aturan tersebut mengganggu demokrasi di Indonesia dan sangat lemah dari sisi filosofis dan yuridis.

“Kita jelas menolak Perppu Ormas,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, aturan itu akan mengganggu demokrasi di Indonesia. Perppu tidak boleh menjadi pengadilan untuk membubarkan ormas.”

“Mardani Ali Sera, menilai perppu tersebut sangat lemah dari sisi filosofis dan yuridis”

Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)

Keputusan moral yang dapat ditemukan dalam berita ini adalah setiap organisasi kemasyarakatan yang menegasaikan NKRI dan anti-Pancasila akan ditindak tegas oleh Pemerintah. Hizbut tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh ormas yang esensinya bertentangan dengan Pancasila dan telah dibubarkan oleh Presiden. Gatra juga memberikan penilaian moral bahwa penerbitan Peppu Ormas

ini merupakan langkah tepat pemerintah atas respon kegelisahan masyarakat selama ini.

“Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, penerbitan Perrpu Ormas bukan semata untuk mencabut kelembagaan Ormas. Melainkan, penyempurnaan atas UU Ormas sebelumnya.”

“Tjahjo menandakan, Peeppu Ormas ini berlaku umum dan tidak terafiliasi pada ormas tertentu. Menurutnya, ini menjadi gesture tegas Jokowi untuk memperingati ormas anti-Pancasila dan UUD 1945. Jokowi ingin menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa Indonesia.”

Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Pemenuhan informasi merupakan tujuan utama dari majalah Gatra pada berita ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil data-data yang tersedia berupa hasil survey, kutipan-kutipan pernyataan langsung dari pihak yang terkait dalam persoalan Perppu Ormas. Hasil survey dan kutipan langsung tersebut memberi informasi kepuasan tersendiri bagi pembaca yang ingin mengetahui informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penegakan hukum terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu juga, Gatra menampilkan pernyataan dari menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo, mengenai solusi dari persoalan yang menyangkut isu konsensus nasional yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

“Perppu Ormas ini, Tjahjo melanjutkan, juga untuk menangkal gerakan radikalisme yang mudah menyusup ke gerakan ormas. “Ini sangat penting untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ia menegaskan.

Gatra juga mencantumkan kutipan langsung dari narasumber yang berasal dari Analisis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, untuk memberikan solusi pada persoalan yang diberitakan. Penyajian solusi yang berbeda dari narasumber

menunjukkan bahwa majalah Gatra ingin menjaga keseimbangan dalam pemberitaannya.

“Jokowi lebih banyak disibukkan dengan isu non-ekonomi. Bahkan fokusnya mulai terpecah. Seharusnya Jokowi disibukkan dengan target lain, seperti membangun infrastruktur. Terkait dengan isu toleransi, keberagaman, Pancasila dan PKI, Hendri menilai Jokowi bisa lebih responsif.”

TABEL 4.2.8

Frame III: Lugas Menindak Ormas Bablas

<p><i>Define Problems</i> (Pendefenisian masalah)</p>	<p>Kebebasan berekspresi yang kebablasan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah kaprah terhadap penggunaan kebebasan berekspresi yang kebablasan sehingga muncul pemikiran radikal yang menyusup di ormas. 2. Perppu Ormas dinilai semakin membuat pemerintah lebih otoriter
<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap organisasi kemasyarakatan yang menegasisaikan NKRI dan anti-Pancasila akan ditindak tegas oleh Pemerintah 2. Penerbitan Peppu Ormas ini merupakan langkah tepat pemerintah atas respon

	kegelisahan masyarakat selama ini.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perppu Ormas digunakan untuk menangkal gerakan radikalisme yang mudah menyusup ke gerakan ormas. 2. Presiden Jokowi harus bisa lebih responsive

4.2.2.4 Analisis *Framing* Berita 4

TABEL 4.2.9

Karakteristik Majalah

Tanggal Terbit	19-25 Oktober 2017
Halaman	126
Judul Berita	Menghidupkan Spirit Pancasila

Defenisi Masalah (*Define Problem*)

Majalah Gatra pada pemberitaan ini menginformasikan tentang program pemerintah yang membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang berfungsi untuk menghidupkan kembali spirit Pancasila di Indonesia. Gatra memaknai masalah pada berita ini sebagai meredupnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat akibat dampak dari perubahan sosial politik sehingga semakin memanaskan isu-isu yang berhubungan dengan SARA, kebebasan berpendapat hingga isu konsensus nasional.

Gatra mengembangkan frame berita ini dengan mengutip pernyataan langsung dari narasumber terkait yaitu Yudi Latif, PhD, selaku kepala UKP-PIP, yang menyatakan bahwa ada ancaman terhadap Pancasila yang asalnya dari ke-lima jurusan sila yang ada.

“Yudi mengingatkan potensi ancaman pada pancasila. Selama ini, jurusan itu hanya ada dari sila pertama saja, Ketuhanan yang Maha Esa. Yakni, berkaitan dengan ateisme, komunisme, dan lenisme. Padahal ancaman itu bisa datang dari lima jurusan sila,”katanya.

“Ancaman sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Contohnya, hak ekonomi, politik, dan budaya. Seperti menguasai sektor ekonomi di satu tangan dengan mengabaikan hak ekonomi sosial budaya masyarakat.

“Ancaman sila ketiga, Persatuan Indonesia, misalnya gerakan separatism memecah belah bangsa. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contoh ancamannya politik yang didikte oleh kekuatan modal sehingga membuat puluhan kepala daerah ditangkap KPK. Terakhir, ancaman sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkaitan dengan kesenjangan yang terlalu lebar.”

Memperkirakan Masalah (*Diagnose Causes*)

Gatra pada pemberitaan ‘Menghidupkan Spirit Pancasila’, menonjolkan tentang program UKP-PIP yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Majalah Gatra menjelaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk menghidupkan kembali spirit Pancasila. Gatra melihat yang menjadi sumber masalah dalam pemberitaan ini yaitu karena pemerintah menghilangkan pelajaran Pancasila di sekolah. Gatra mengutip pernyataan langsung dari Yudi Latif yang mengamini bahwa spirit Pancasila mulai menghilang dari implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saat ini, spirit Pancasila meredup setelah pelajaran Pancasila dihilangkan dari persekolahan. “Sehingga Pancasila mulai aus dari segi keyakinan orang. Pancasila juga kurang dipahami kandungan nilainya. Secara

prilaku pun menjadi kurang dibumikan,”ungkap Kepala UKP-PIP, Yudi Latif.”

Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*)

Adapun penilaian moral yang diberikan majalah Gatra adalah bahwa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk sedang menghadapi kelunturan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila mulai aus dari segi keyakinan orang. Pancasila juga kurang dipahami kandungan nilainya. Secara prilaku pun menjadi kurang dibumikan.

Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*)

Gatra dalam memilih judul pada berita ini cenderung menunjukkan bahwa berita ini merupakan penyelesaian yang ditawarkan dari segala isu yang berkembang dalam suhu Politik di tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk, yaitu kembali pada Pancasila. Untuk itu majalah Gatra menekankan penyelesaian lewat kutipan langsung dari narasumber terkait yaitu Siti Zuhro selaku pengamat politi dan juga profesor riset LIPI, agar pemerintah lewat UKP-PIP ini dapat kembali menanamkan nilai Pancasila tidak hanya berfokus pada generasi milenial namun kepada semua generasi di Indonesia.

“Profesor riset LIPI menilai sosialisasi Pancasila bisa dilakukan dengan semangat sofistikasi tinggi. “Untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila butuh waktu yang diikuti aplikasi konkret, baik di tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik dan masyarakat luas,”kata Siti. Penting juga bagi UKP-PIP untuk tidak hanya fokus pada generasi milenial, melainkan juga semua generasi.

“Poin penting yang akan menjadi fokus UKP-PIP akan menekankan tentang rencana Kemendikbud menjadikan Pancasila sebagai pelajaran wajib kembali. Serta bagaimana menyuguhkan metode belajar dan pengajaran menarik dan kekinian, sesuai generasi milenial.

TABEL 4.2.9**Frame IV: Menghidupkan Spirit Pancasila**

<p><i>Define Problems</i> (Pendefenisian masalah)</p>	<p>Meredupnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat akibat dampak dari perubahan sosial politik sehingga semakin memanaskan isu-isu yang berhubungan dengan SARA, kebebasan berpendapat hingga isu konsensus nasional serta adanya ancaman langsung yang berasal dari kelima sila.</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Sumber masalah dalam pemberitaan ini yaitu karena pemerintah menghilangkan pelajaran Pancasila di sekolah</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk sedang menghadapi kelunturan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UKP-PIP tidak hanya berfokus pada generasi milenial namun kepada semua generasi di Indonesia. 2. Untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila butuh waktu yang diikuti aplikasi konkret,

	<p>baik di tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik dan masyarakat luas.</p> <p>3. Kemendikbud menjadikan Pancasila sebagai pelajaran wajib kembali. Serta bagaimana menyuguhkan metode belajar dan pengajaran menarik dan kekinian.</p>
--	--

4.3 Pembahasan

Majalah Gatra edisi 19-25 Oktober 2017 merupakan edisi khusus yang memberitakan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada majalah edisi khusus ini, Gatra menyajikan 30 pemberitaan yang disajikan dalam dua sudut pandang besar, yakni pencapaian sektor ekonomi dan pencapaian bidang politik. Dari masing-masing sudut pandang itu dielaborasi ke dalam sub-bahasan yang lebih spesifik. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah terkait pada sudut pandang bidang politik dan penegakan hukum.

Berdasarkan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis isi tekstual konvensional yang digunakan peneliti pada kajian awal, terlihat bagaimana seleksi isu serta penonjolan isu yang digunakan Gatra terkait sudut pandang politik dan penegakan hukum. Dari total 11 pemberitaan bidang politik dan penegakan hukum tersebut, majalah Gatra menyeleksi serta menonjolkan isu pada empat berita yang berfokus pada isu kebebasan berpendapat, SARA dan juga konsensus nasional. Judul pemberitaan tersebut adalah (1) *Menjaga Ketertiban Bukan Anti*

Kritik, (2) Meredam Pilkada Rasa Sara, (3) Lugas Menindak Ormas Bablas, (4) Menghidupkan Spirit Pancasila.

Berita pertama yang dianalisis oleh peneliti pada intinya membahas mengenai isu kebebasan berpendapat, dimana dalam tiga tahun pemerintahannya Presiden dianggap tidak tegas dalam menegakkan hukum dan ada indikasi mengekang kebebasan berpendapat rakyat. Kasus seperti dugaan makar hingga kasus penersangkaan terhadap pihak yang mengkritik pemerintah dibahas Gatra pada awal pemberitaan. Dalam menuliskan fakta, Gatra mengambil kutipan dari dua orang narasumber yaitu pengamat politik, Tjipta Lesamana dan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

Hal yang menarik pada seleksi dan penonjolan isu pada berita ini adalah meskipun pada headline pemberitaan Majalah Gatra terlihat menyudutkan pemerintah dengan menyajikan lead yang cukup provokatif serta argumen dari narasumber yang mengatakan bahwa ada indikasi pemerintah ke arah dictator karena sikapnya yang terlihat semakin anti kritik dan juga terkait kasus yang belum jelas proses hukumnya disertai penyajian foto Jonru Ginting dan web Saracen, namun dari keseluruhan isi berita '*Menjaga Ketertiban Bukan Anti Kritik*', terlihat bahwa Gatra ingin menutup keseluruhan berita dengan memberikan keputusan moral bahwa pemerintah tidaklah anti kritik, melainkan hanya menjaga ketertiban lewat aksi penangkapan orang-orang yang mengkritik kebablasan. Hal ini dapat dilihat dari cara wartawan mengutip kutipan Menteri Luar Negeri saat menutup artikelnya.

Pada berita kedua intinya mengenai meningkatnya jumlah ujaran kebencian serta konten berbau SARA saat menjelang Pemilu. Isu ini dikaitkan Gatra dengan kasus penistaan agama Ahok yang kemudian berimbas pada elektabilitas Jokowi. Akibat elektabilitas yang menurun tersebut, Jokowi melakukan manuver politik dimana pada akhir penutup berita Gatra menyajikan hasil lembaga Survey yang menyatakan belum terentaskannya isu SARA tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan kepada tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap Jokowi. Presiden Jokowi masih belum memiliki lawan yang kompetitif dalam pemilu mendatang.

Berita ketiga dengan judul "*Lugas Menindak Ormas Bablas*", disini majalah Gatra melihat bahwa kebebasan berpendapat disalahgunakan oleh organisasi masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia, yang menjadi sorotan dalam berita ini dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan sudah sewajarnya untuk dibubarkan. Hal ini membuat Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Perrpu Ormas dan menindak HTI dengan melakukan pembubaran.

Terkait berita ini, majalah Gatra memperkuat fakta dengan menyajikan data dari lembaga Survey Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 1220 responden pada 17-24 September mengenai tingkat pengenalan Perrpu Ormas dan penerimaan publik terhadap pelarangan HTI. Hasil dari survey tersebut menyatakan 75% mendukung Perrpu Ormas dan sebanyak 42% responden setuju bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini, terlihat Gatra hanya mencantumkan hasil dari satu lembaga survey saja dan tidak ada pembanding.

Pada berita terakhir mengenai “Menghidupkan Spirit Pancasila”, majalah Gatra mendefinisikan masalahnya sebagai meredupnya nilai-nilai Pancasila akibat dari perubahan sosial politik sehingga dianggap semakin dapat memicu isu-isu yang berhubungan dengan SARA, kebebasan berpendapat, hingga dapat mengganggu konsensus nasional. Pada berita ini, majalah Gatra memberikan info bahwa pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam membingkai isu terkait kebebasan berpendapat, SARA, dan juga konsensus nasional, menunjukkan bahwa majalah Gatra cenderung memihak Pemerintah dalam membingkai pemberitaannya. Hal ini terlihat dari cara Gatra dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah. Meskipun pada lead berita, Gatra cenderung memakai lead yang memprovokasi mengenai kelemahan-kelemahan pemerintah beserta contoh kasus yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, namun pada bagian penutup Gatra mengedepankan perspektif, pandangan, dan pendapat dari narasumber yang mengklaim bahwa isu yang berkembang tersebut hanya instabilitas politik yang bertujuan untuk melemahkan Presiden Jokowi.

Proses framingpun dapat dilihat dari bagaimana wartawan mulai mengkonstruksikan realitas yang ada melalui pemilihan judul, narasi pemberitaan, *visual image*, pemilihan narasumber, hingga penyajian hasil evaluasi lembaga survey yang cenderung berpihak pada pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis tentang pembingkai berita yang dilakukan media massa Majalah Gatra edisi khusus pemberitaan *tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk* edisi 19-25 Oktober 2017 terkait bidang politik dan penegakan hukum dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Analisis framing dengan menggunakan model Robert Entman dapat digunakan untuk melihat konstruksi berita tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk terkait bidang politik dan penegakan hukum yang menghasilkan frame majalah Gatra terhadap pemberitaannya. Dari pendekatan Entman inilah terlihat seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu pada masing-masing berita. Isu yang diberitakan adalah selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk pemerintah dihadapi dengan berbagai isu kebebasan berpendapat, SARA, dan konsensus nasional.
2. Dari keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam membingkai isu terkait kebebasan berpendapat, SARA, dan juga konsensus nasional, menunjukkan bahwa majalah Gatra cenderung memihak Pemerintah dalam membingkai pemberitaannya. Hal ini terlihat dari cara Gatra dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah. Meskipun pada lead berita, Gatra cenderung memakai lead yang memprovokasi mengenai kelemahan-kelemahan pemerintah beserta contoh kasus yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik,

3. namun pada bagian penutup Gatra mengedepankan perspektif, pandangan, dan pendapat dari narasumber yang mengklaim bahwa isu yang berkembang tersebut hanya instabilitas politik yang bertujuan untuk melemahkan Presiden Jokowi. Gatra pun cenderung hanya menyajikan hasil dari satu lembaga survey saja dalam memperkuat fakta yang ada dalam satu pemberitaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi media diharapkan agar lebih objektif dalam penyampaian beritanya, karena terkadang terdapat kepemihakan baik dari penulisan judul, kata-kata yang digunakan dan kalimat itu sendiri. Seharusnya media memberikan berita yang objektif agar menciptakan pembaca yang lebih kompeten. Bukannya mendoktrin pembaca harus setuju dengan isi berita yang disampaikan.
2. Bagi pembaca diharapkan dalam membaca berita agar tidak langsung terpengaruh oleh berita yang dimuat di media. Tetapi lebih bijaksana menyikapi pemberitaan tersebut agar tidak memihak ataupun menolak. Pembaca perlu mengetahui bahwa teks berita yang disajikan oleh media tidak ada yang seratus persen bersifat objektif. Teks berita tersebut telah melalui proses konstruksi baik dari wartawan dan juga media.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Yovantra dan Wisnu. 2015. *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: InsistPress
- Arifin, Anwar, Prof. Dr. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cangara, Hafied, Prof.Dr.H.Msc. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana, Prof, M.A .2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____ .2007. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Kriyanto, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Kusumaningrat, Hikmat. 2006. *Jurnalistik: teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Kompas
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Wacana: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotik, Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tamburaka, Apriadi (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarko, Heri.(2000). *Mendeteksi Bias Berita: Panduan Untuk Pemula*. Yogyakarta: KLIK.
- Yunus, Syarifudin (2010). *Jurnalistik Terapan*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

SKRIPSI

- Khumairah, Rizki. *Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Berita Pilkada DKI Jakarta 2017 di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2017.
- Purba Ramos, Raja. *Konstruksi Pemberitaan Satu Tahun Kabinet Kerja di Media Massa Nasional (Analisis Framing Robert Entman Mengenai Pemberitaan Satu Tahun Kabinet Kerja Di Majalah Gatra)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara: Medan, 2016

WEBSITE

1. <http://www.liputan6.com/tag/3-tahun-jokowi-jk> diakses tanggal 20 November 2017
2. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/10/25/126457/3-tahun-jokowi-jk-dinilai-masih-punya-banyak-pr.html> diakses tanggal 20 November 2017
3. <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16393701/3-tahun-jokowi-jk-pks-anggap-ada-penurunan-indeks-demokrasi-dan-berpolitik> diakses tanggal 20 November 2017
4. <http://www.komunikasipraktis.com/2015/04/komunikasi-massa-pengertian.html> diakses tanggal 22 Januari 2018.
5. <http://terinspirasi.komunikasi.blogspot.co.id/2013/03/pengetian-teori-hirarki-pengaruh-isi.html> diakses tanggal 30 Maret 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas:

Nama : Diah Permata Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Plaju, 21 Juni 1996
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Denai No.152 Medan

2. Orang Tua:

Nama Ayah : Aryanto, S.H (alm)
Nama Ibu : Nurmi Jalil
Alamat Orangtua : Jl. Denai No.152 Medan

3. Jenjang Pendidikan:

SD Negeri 060912 : Lulus Tahun 2007
SMP Negeri 13 Medan : Lulus Tahun 2010
SMA Negeri 8 Medan : Lulus Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara



TIGA TAHUN
JOKOWI-JK

Kebebasan berekspresi di era reformasi sudah lama dimanfaatkan berbagai elemen yang diragukan komitmennya pada konsensus kebangsaan untuk konsolidasi diri. Kampanye khilafah, salah satu model organisasi politik dalam tradisi Islam, dirasa makin terbuka. Belakangan terutama setelah muncul ISIS di Suriah-Irak, sejak Ramadhan 2014, yang menyedot banyak pendukung di Indonesia.

Sebelum ada ISIS, kampanye khilafah digencarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Sudah lama muncul kegelisahan, bagaimana ormas yang esensinya bertentangan dengan Pancasila, sebagai konsensus kebangsaan, dibiarkan leluasa beroperasi. Kebebasan disalahgunakan menjadi kebablasan.



Menkopolkumham Wiranto (tengah) memberikan keterangan pers tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, Mei 2017.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam isu ini, membuat terobosan dengan mempermudah mekanisme sanksi pada ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai revisi atas UU Ormas sebelumnya, Nomor 17/2003, yang mekanisme sanksi pada ormasnya lebih rumit.

Perppu ini menanti polemik. Yang pro berargumentasi, perppu ini menjawab tuntutan akan sikap tegas pemerintah. Bagi yang kontra, perppu ini gampang menjadikan pemerintah lebih otoriter, karena —tak seperti dalam UU

Ormas sebelumnya— pembubaran ormas bisa dilakukan tanpa lebih dahulu menempuh jalur pengadilan.

Kini, perppu tersebut tengah dibahas DPR, untuk disetujui atau ditolak. Targetnya, keputusan DPR bisa ketok dalam rapat paripurna, 24 Oktober ini. Senin pekan lalu, Komisi II melakukan rapat internal dengan para pakar, ormas, serta akademisi, dan pihak terkait. Pertemuan itu untuk gambaran sebelum rapat sikap mudi fraksi pada Jumat ini.

Fraksi yang menolak perppu adalah Partai Gerindra dan PKS. Anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai perppu tersebut sangat lemah dari sisi filosofis dan yuridis. Menurutnya, PKS dalam posisi menolak peraturan tersebut.

Sikap yang sama juga disampaikan petinggi Partai Gerindra. "Kita jelas menolak Perppu Ormas," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, aturan itu akan mengganggu demokrasi di Indonesia. Perppu tidak boleh menjadi pengadilan untuk membubarkan ormas.

Fadli memaparkan, Gerindra terus melobi partai lain agar menolak Perppu Ormas. "Akan kita sampaikan secara informal dan mengajak partai-partai agar bersama-sama menolak," katanya. Partai yang akan dilobi terutama yang sebelumnya sama-sama menolak RUU Pemilu, yakni PKS dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, memprediksi pembahasan Perppu Ormas akan alot. "Masih ada silang pendapat cukup keras. Sehingga ada kemungkinan masa pembahasannya diperpanjang," kata politisi Partai Amanat Nasional itu kepada wartawan.

Perppu Ormas lahir di tengah menguatnya desakan untuk menindak ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Yang tengah dalam sorotan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas pengusung khilafah, sistem politik yang dinilai bertabrakan dengan NKRI dan Pancasila.

Selang sembilan hari setelah terbit Perppu Ormas, pemerintah pun membubarkan HTI. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, mencahkir Surat Keterangan (SK) Badan Hukum ormas yang berdiri sejak 2 Juli 2014 tersebut.

Akhir Agustus 2017, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk Pembinaan eks anggota HTI. Keputusan itu ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo. SKB tersebut muncul setelah mencuatnya berbagai ancaman dari Mendagri dan sejumlah kepala daerah untuk menindak pegawainya dengan sipil yang ikat HTI.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, penerbitan



MEREDAM PILKADA RASA SARA

Eskalasi dan intensitas isu SARA sangat tinggi di pilkada DKI 2017. Berimbas pada merosotnya dukungan terhadap Presiden Jokowi periode Oktober 2016 sampai Januari 2017. Bakal menular pada pilkada langsung 2018 dan pilpres 2019?

Tidak sedikit yang menyebut pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi di ibu kota negara. Sejarawan dari Universitas Indonesia, J.J. Rizal, mengemukakan hal itu dalam sebuah diskusi di Grand Sahid Hotel, Jakarta, pada Maret 2017. Bulan berikutnya, giliran peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengerengahkan kesimpulan yang sama dalam forum diskusi di Cikini, Jakarta Pusat. Keduanya menyebut dominasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai penyebabnya.

Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di pilkada DKI 2017 mulai diintrodusir menanggapi keputusan petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Mulai ada yang menyoal tentang latar belakang agama dan etnis Ahok, dan itu diprediksi akan menjadi batu ujian bagi gubernur yang punya modal mentereng di bidang kinerja.

Tapi setelah pidato Ahok di Kepulauan Seribu, Jakarta, yang menyebut-nyebut *Al-Mudab* ayat 51, eskalasi dan intensitas penyebaran isu SARA menjadi kian meningkat. Seperti diketahui, atas ucapannya pada September 2016 itu, Ahok lantas harus berurusan dengan pengadilan dan divonis dua tahun penjara pada Mei 2017. Majelis hakim menilai Ahok terbukti telah melakukan penodaan agama.

Pada Oktober 2016, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi isu agama sebagai faktor yang dapat menumbangkan Ahok. Setelah kejadian di Kepulauan Seribu, dukungan terhadap Ahok mulai turun. Salah satunya disebabkan bertambahnya sentimen



anti-Ahok karena alasan agama. Persentase jumlah pemilih muslim yang tak menginginkan gubernur non-muslim meningkat dari 40% (Maret 2016) ke 55% (September 2016). Padahal pemilih muslim sekitar 90% dari populasi pemilih Jakarta.

Panggung kontestasi politik menjadikan intensitas isu SARA terus meningkat. Mengiringi serangkaian Aksi Bela Islam (Oktober 2016-Mei 2017), terutama di media sosial, kian memanaskan lalu lintas isu SARA. Di media sosial, eskalasinya bahkan lebih sengit.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, jumlah konten berbau SARA dan ujaran kebencian

di dunia maya mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 dengan 5.142 laporan. Usai pemungutan suara putaran pertama pilkada DKI digelar pada Februari 2017, laporan sempat turun drastis. Namun pada April-Mei, jumlah laporan kembali meningkat menyambut putaran kedua yang berlangsung pada April 2017 dan menjelang sidang putusan kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok.

Safari politik meningkatkan elektabilitas Jokowi yang menurun akibat kasus penistaan agama

Temuan yang kurang-lebih sama diketengahkan lembaga riset, analisis, dan *monitoring* media sosial dan media dalam jaringan, Indonesia Indicator. "Isu SARA di kontestasi pilkada 2017 yang paling masif hanya ada di DKI Jakarta," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang. "Isu SARA di pilkada daerah-daerah lain situasinya masih bisa terkendali. Kalaupun ada, kecil nilainya dan kurang memberikan dampak secara nasional," ia menambahkan.

Isu SARA bersifat fluktuatif. Selalu ada terpancra di media sosial sepanjang waktu dengan intensitas rendah. Namun begitu memasuki Pemilu intensitasnya akan meningkat tajam: apalagi jika ada momentum atau peristiwa yang membuka peluang serangan SARA.

Dalam catatan Indonesia Indicator, sejak 2012, kampanye negatif dengan menggunakan isu SARA sudah muncul. Awalnya, pada masa itu, kampanye negatif disebarkan melalui layanan pesan singkat (SMS) dan aplikasi antar-pesan BlackBerry (BBM).

Hasil riset Indonesia Indicator tentang kampanye hitam di pilkada periode 2012-2017 menunjukkan bahwa isu korupsi dan skandal tidak berpengaruh besar dalam pilkada. Tapi ketika menyentuh SARA, dampaknya jauh lebih besar dan masif.

Kasus keselen melihat Ahok berimbas pada dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, keduanya berpasangan dan berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada DKI 2012. Dari latar be-

lakang itu berkembang gosip umum bahwa Presiden mendukung Ahok dalam pilkada DKI 2017.

Unbas kasus Ahok terhadap Jokowi terbaca antara lain dari rangkaian gerakan massa Aksi Bela Islam yang mulai nyerempet-nyerempet pada sosok personal mantan Walikota Surakarta itu. Ditambah lagi ribut-ribut soal dugaan makar sejumlah tokoh, dan cara penanganannya yang dituding "beprevent", mengalihkan tingkat penerimaan masyarakat (*approval rating*) terhadap Jokowi merosot. "Ada instabilitas politik yang berimbas melambatkan Jokowi, bukan menastihkannya," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Buchanuddin Muhtadi.

Unbas lainnya terlihat dalam analisis data survei Indikator Politik Indonesia tentang tren menurunnya elektabilitas dan dukungan terhadap Presiden Jokowi mulai Oktober 2016, dan mencapai titik terendah di Januari 2017.

Di tengah instabilitas itu, Jokowi menunjukkan respons yang liris dikenal dengan sebutan safari politik. Ia melakukan manuver *realis* ke kantong-kantong Islam, mulai ormas hingga pesantren. Juga bertemu dengan elite partai politik, TNI, dan Polri sambil membawa pesan tentang kebinekaan untuk menjawab kian maraknya isu SARA.

Secara elektoral, upaya dan manuver politik Presiden dalam meredakan isu SARA membuahkan hasil. Dalam catatan Indikator, mulai Mei 2017, elektabilitas Jokowi kembali bergerak naik. Temuan Indo Barometer melalui survei yang digelar Maret 2017 juga telah memperlihatkan kecenderungan yang sama.

Masudnya, kekhawatiran politik terhadap isu SARA belum reda. Indo Barometer mengidentifikasi lima permasalahan terpenting yang dihadapi pemerintah Jokowi-JK di dua serengah tahun masa kepemimpinannya. Masalah agama dan SARA menempati posisi ketiga dengan 8,1%. Posisi pertama dan kedua didominasi permasalahan perekonomian riil (16%) dan harga sembako (14,6%).

Presiden Jokowi menyadari hal itu. Kepada media nasional Juni lalu, Presiden mengeluhkan suhu politik yang masih panas meski perhelatan pilkada serentak 2017 telah rampung dan masyarakat telah memberikan pilihannya.

Belum terentaskannya isu SARA secara optimal dan sejumlah pekerjaan rumah lainnya tidak membawa banyak pengaruh kepada tingkat kepercayaan dan dukungan publik menjelang tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasil survei nasional terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan kecenderungan tersebut. Survei ini digelar pada periode 3-10 September 2017 dengan 1.228 responden yang tersebar secara proporsional di wilayah seluas seluas dengan basis provinsi dan margin *of error* di kisaran 3,1%.

Lewat model pertanyaan *top of mind*, survei ini mendapati dukungan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai



← Saracennews.com



HOME INFO EVENTS PHOTOS VIDEOS POSTS COMMUNITY REVIEWS



Tertelak dengan Cina, yang dalam pengamatan Tjipta memiliki tendensi tertentu. Misalnya pada proyek kereta cepat, Cina bisa menang karena ia langsung meng-acc. Itu tidak seperti yang dilakukan Jepang yang memikirkan segala kemungkinan logis dan kerja sama finansial.

Serupa dengan era Orde Lama tahun 60-an, menurut pengamatan Tjipta, kini Indonesia mulai 'terlalu dekat' dengan Cina. "Saya kalau bicara soal politik blak-blakan. Sentimen anti-Cina di Republik Indonesia sampai detik ini masih besar. Sentimen itu setiap saat bisa diledakkan oleh lawan-lawan Jokowi," katanya.

Kelebihan lain, pemerintahan Presiden Jokowi berikutnya yaitu sosoknya yang dekat dengan rakyat. "Jokowi ini pemimpin yang *grounded*. *Grounded* itu dia menitik ke bawah. Dia memperhatikan nasib rakyat kecil, dia bergaul dekat dengan rakyat kecil. Dia seperti tidak menjangka jarak. Jokowi memang populer, Jokowi dicintai. Itu kelebihan dari pemerintahan Jokowi," katanya. Namun, tentu saja, kelemahan dari kelebihanannya itu juga tetap ada, yaitu kurang tegas.

Kekurangtegasan itu juga terlihat pada sikap Pemerintah terhadap Saracen. Pengamat politik berusia 68 tahun itu menganggap penyikapian tersebut termasuk kelemahan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini termasuk titik lemah pemerintahan Jokowi di bidang penegakan hukum. Terlalu banyak mulut. Lelet, lambat sekali. Dari awal sejak bulan Juli Polri sudah menemukan tersangka. Prosesnya lama. Makanya baru juga tambah berat. Itu kelemahan pemerintahan Jokowi di bidang *law enforcement*," katanya kepada Dewi Fadhillah Soemanagara dari GATRA.

Tetapi, hal tersebut bukan berarti mengancam kebebasan berpendapat. Menurut Tjipta, perlu dipahami terlebih dahulu konsep demokrasi, yang kerap disalahartikan

anak moda. Demokrasi bukan berarti hanya 'kebebasan mengemukakan pendapat' atau berekspresi. "Definisi demokrasi tidak hanya itu. Demokrasi itu seperti sebuah bangunan dengan pilar-pilar pendukung," kata Tjipta.

Pilar pendukung itu antara lain kebebasan berpendapat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pemilihan pemimpin secara periodik yang jujur dan adil. Menurut Tjipta, demokrasi bukan hanya kebebasan menyatakan pendapat. "Di Amerika, di semua negara yang merupakan bapak moyang sistem demokrasi, tetap membatasi. Misalnya, enggak bisa sembarangan menghina agama. Di mana-mana ada aturan itu batasannya. Singkat kata, dalam sistem demokrasi tidak boleh seenaknya berbicara," katanya.

Bila warga itu bebas bicara apa saja di media sosial, menurut Tjipta, itu bisa mengakibatkan kelacunan, bahkan bisa terjadi perang saudara. Jadi kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers tidak absah sifatnya. "Kebebasan itu tetap *limited freedom*, tetap ada batasan-batasan tertentu," katanya.

Soal landasan hukum, kata Tjipta, Pemerintah bisa menggunakan yang sudah ada. "Enggak usah jauh-jauh, pakai saja KUHP, UUTK. Ini kesannya Pemerintah setengah berani, banyak *ngambang*," ujarnya.

Terkait dengan sikap Pemerintah yang terlihat semakin autoritik, Tjipta mengamatinya sebagai indikasi ke arah diktator atau otoritarian. "Tetapi itu bukanlah penyataan Tjipta," katanya. Menurut teori, pemerintah yang alergi kritik dan marah jika dikritik, mengindikasikan bahwa roda pemerintahannya mulai bergulir ke ranah otoritarian atau *authoritarian*. "Saya khawatir pemerintahan Jokowi sudah mulai bergulir ke sana. Kritik, enggak apa-apa. Saya suka kritik, tapi juga kritik ada batas-batasnya. Kritik bukan *anonymus*. Kita tidak boleh kritik pribadi orang, apalagi



Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Syafiq Maarif, Try Sutrisno dalam acara program pendidikan penguatan Pancasila

“Ancaman terhadap Pancasila itu bisa datang dari lima jurusan sila.”

Yudi Latif, PhD
Kepala Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi
Pancasila (UKP-PIP)

menarik dan kekinian, sesuai generasi milenial.

Selain fokus tadi, Yudi melanjutkan, UKP-PIP juga berfungsi menggerakan kinerja kementerian atau lembaga dalam menjalankan Pancasila. Terutama untuk pengukuran pelaksanaan keefektifan dan efisiensi. “Dulu Pancasila menjadi alat negara memonitor (karakter) rakyat,” ujarnya. Kini, rakyat juga ingin mendapatkan kepastian

bahwa penyelenggara negara juga mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan Pancasila.

UKP-PIP akan membuat indeks realisasi Pancasila

untuk mengukur sejauh mana penerapan nilai-nilai ajaran tersebut dalam lembaga pemerintahan dan perusahaan. Targetnya, indikator dan variabel itu rampung tahun ini. Survei akan dilakukan mulai 2018.

Evaluasi berikutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatannya lebih kepada partisipasi komunitas. Mereka itu bisa rohaniawan, tokoh agama, budayawan, pemuka adat, atau jurnalis yang ikut terlibat dalam mengisi dan membudayakan Pancasila.

Di luar itu, Yudi mengingatkan potensi ancaman pada Pancasila. Selama ini, jurusan itu hanya ada dari sila pertama saja, Keruhanan Yang Maha Esa. Yakni, berkaitan dengan ateisme, komunisme, dan leninisme. “Padahal ancaman terhadap Pancasila itu bisa datang dari lima jurusan sila,” katanya.

Ancaman dari sila lainnya, misal pada sila kedua, “Kemasyarakatan yang adil dan beradab”. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Contohnya, hak ekonomi, politik, dan budaya. Seperti menguasai sektor ekonomi di satu tangan dengan mengabaikan hak ekonomi sosial budaya masyarakat.

Ancaman sila ketiga, “Persatuan Indonesia, misalnya, gerakan separatisme memecah belah bangsa. Ancaman sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, contohnya, politik yang didikte oleh kekuatan modal sehingga membuat puluhan kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terakhir, ancaman sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini berkaitan dengan kesenjangan yang terlalu lebar. “Bagaimana menyngkut haat hidup orang banyak tidak dikuasai negara namun oleh perorangan. Itu juga bertentangan dengan Pancasila,” ungkap Yudi.

Sementara itu, pengamat politik Siti Zuhro menilai, tugas UKP-PIP tidak mudah. Ini berkaitan dengan perubahan sosial politik dampak globalisasi. Terjadi fragmentasi kekuatan-kekuatan politik dan masyarakat. Di luar itu, tak jarang pemilu dan pilkada memunculkan pelarisan politik tajam dengan menyisakan masalah serius.

Profesor riset LIPI tersebut menilai sosialisasi Pancasila bisa dilakukan dengan semangat sofistikasi tinggi. “Untuk memahami nilai-nilai Pancasila butuh waktu yang diikuti aplikasi konkret, baik di tataran suprapstruktur maupun infrastruktur politik dan masyarakat luas.” Juru Siri kepada wartawan Gema Viridisa Risky Utama.

Penting juga bagi UKP-PIP untuk tidak hanya fokus pada generasi milenial, melainkan juga semua generasi. Menurut Siti, itu penting untuk menyamakan pandangan. Tentang dilibatkannya Kemendikbud dalam penyebaran ide Pancasila, Siti menilai langkah itu sudah tepat. Secara struktural, otoritas serta fasilitas dan jejaring memang sudah lengkap dan berkapasitas. ■

BIRNY BIRDYANI,
HENDRY RORIS P. SIANTURI, DAN FLORA LIBRAYANTI

TINGKAT PENERIMAAN PUBLIK TENTANG PELARANGAN HTI



TINGKAT PENGENALAN TERHADAP PERPPU ORMAS



Sumber: Survei Indikator (17-24 September 2017)

Perppu Ormas bukan semata untuk mencabut kelembagaan Ormas. Melainkan, penyempurnaan atas UU Ormas sebelumnya. "Ini sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat," ia meandaskan.

Pernyataan Tjahjo cocok dengan hasil survei nasional evaluasi tiga tahun Jokowi-JK oleh Indikator Politik Indonesia. Riset lembaga pimpinan Burhanudin Murtadi ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.220 responden pada 17-24 September lalu. *Margin of error-nya 2,9%*.

Jawaban survei ini, 32% publik tahu bahwa Jokowi menerbitkan Perppu Ormas. Dari jumlah yang tahu itu, 73% setuju penerbitan perppu. Sebanyak 29,8% responden mendukung dengan alasan menjaga keutuhan NKRI. Lalu 29,5% menerima atas argumen memperkuat Pancasila dan UUD 1945. Serta 10,8% menilai ini untuk menjaga keadilan bangsa Indonesia.

Lalu, 35% tahu kelembagaan HTI. Juga, 62% tahu cita-cita HTI mendirikan khilafah. Sebanyak 42% responden yang tahu perppu setuju bahwa HTI bertentangan dengan Perppu Ormas. Tercatat 12,2% menilai gerakan ormas itu meresahkan masyarakat.

Tjahjo meandaskan, Perppu Ormas ini berlaku umum dan tidak terafiliasi pada ormas tertentu. Menurutnya, ini menjadi gestur tegas Jokowi untuk memperingatkan ormas anti-Pancasila dan UUD 1945. Jokowi ingin menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa Indonesia.

Perppu Ormas ini, Tjahjo melampirkan, juga untuk menangkal gerakan radikalisme yang mudah menyusup ke gerakan ormas. "Ini sangat penting untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," ia menegaskan.

Isu komitmen pada konsensus nasional seperti Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika

Sudah lama muncul kegelisahan tentang ormas yang esensinya bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan disalahgunakan menjadi kebablasan.

mulan menguat di era Jokowi. Bermunculan simpatisan ISIS sejak medio 2014, yang mengusung khilafah dan menegasikan NKRI, menjadi sorotan. HTI, ormas yang lebih lama menggaungkan khilafah—meski dengan model lebih moderat dibandingkan dengan ISIS—juga kena imbas.

Analisis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Jokowi lebih banyak dibubukkan dengan isu non-ekonomi. Bahkan, fokusnya mulai terpecah. Jokowi lebih banyak mengenai bidang politik dan keamanan. "Tentang isu toleransi, keberagaman, Pancasila, dan yang baru-baru saja tentang PKI," katanya kepada Dewi Fadilah Soemanagara dari Gatra. Sebenarnya Jokowi dibubukkan dengan target lain, seperti membangun infrastruktur.

Terkait dengan isu PKI, Hendri menilai, Jokowi bisa lebih responsif. Dia menyampaikan statemen tegas. Di hadapan 1.500 prajurit TNI di Tanjung Datar, Kepulauan Narina, Kepulauan Riau, Jokowi mengatakan, "Kalam ada ormas seperti itu (PKI) kita gobuk." Hendri melihat pernyataan itu sebagai bentuk komunikasi politik Jokowi untuk memperlihatkan ketegasan.

Hasil riset Indikator menunjukkan, 52% responden menganggap isu PKI sengaja dibesar-besarkan untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Sebanyak 13% responden tidak menganggap sedang terjadi kebangkitan PKI.

Lalu, 64% publik percaya Jokowi tidak melindungi kelompok kriminal. "Bisa dikatakan, angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan maraknya anggapan itu di media sosial," kata Burhanudin, seperti dilaporkan Rumi Asuzi dari Gatra. Bukan hanya pada HTI, Jokowi juga tegas sikapnya pada PKI.

BIRNY BIRDJANI DAN BERNADETTA FEBRIANA



CATATAN SEMARAK PILKADA SERENTAK

Pilkada 2017 masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama di lima kabupaten di Papua. Menjelang pilkada 2018, isu SARA di pilkada DKI mulai dikloning di Jawa Barat.

Puluhan orang menyerang kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu sore pekan lalu. Mereka datang dari Kabupaten Tolikara, Papua. Kelompok yang menamakan diri sebagai Barisan Merah Putih Tolikara itu adalah pendukung pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tolikara, John Tabo-Barnabas Weyu, dalam pilkada 2017 lalu.

Maksud kedatangan mereka semula adalah menuntut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan keputusan pilkada di kabupaten mereka. John Tabo kalah setelah dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi juga menolak permintaan John Tabo-Barnabas Weyu mandikualifikasi suara 18 distrik. Dengan begitu, pemenang pilkada di Tolikara adalah pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Peristiwa penyerangan itu memberi gambaran tentang persoalan-persoalan yang belum selesai dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Tolikara merupakan satu dari lima kabupaten di Papua yang mengalami konflik pasca-pilkada. "Masih belum berkembang budayanya kalah dan siap menang, serta menggerakkan massa saat tidak bisa menerima kekalahan," ujarnya kepada GATRA.

Pilkada 2017 adalah hajatan besar pemilihan umum langsung kedua dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pilkada pada Februari 2017 itu berlangsung di 101 daerah yang meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota, dengan melibatkan 44,4 juta pemilih dan 310 pasangan calon. Biayanya Rp 5,8 triliun.



Selain konflik horizontal di Papua, kepada GATRA, Tjahjo menyampaikan sejumlah catatan kekurangan dan keberhasilan sebagai materi evaluasi pilkada 2017. Antara lain terkait jumlah calon tunggal. Pada 2017 jumlahnya sembilan daerah, atau naik tiga kali lipat dari jumlah calon tunggal pada pilkada 2015. Seperti diketahui, munculnya pasangan tunggal seringkali dihubungkan dengan sejumlah penyebab, seperti fragmentasi partai pendukung dan kelemahan partai politik dalam mencetak kader yang berkualitas.

Sementara catatan keberhasilan pilkada 2017 di antaranya ditandai dengan peningkatan jumlah partisipasi pemilih. Jika pada pilkada 2015 partisipasinya di kisaran 65%, pada 2017 angka partisipasinya mencapai 74%. "Contoh daerah dengan lonjakan partisipasi tinggi adalah DKI Jakarta," kata Tjahjo.

Badan Pengawas Pemilu juga mempunyai banyak catatan atas penyelenggaraan pilkada 2017 ini. Dalam buku *Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2017 Berasida*, setidaknya ada lima hal yang menjadi pokok dalam evaluasi pilkada 2017 ini.

Kelima hal tersebut adalah politik uang, karnetralan aparatur sipil negara (ASN) yang berkaitan dengan penyalahgunaan program pemerintah dan mutasi pejabat daerah, persoalan hak memilih warga negara (daftar pemilih, tingkat partisipasi dan partisipasi kelompok disabilitas), dana kampanye, dan evaluasi indeks kerawanan pemilu (IKP)



MENGHIDUPKAN SPIRIT PANCASILA

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk untuk menghidupkan kembali spirit Pancasila. Agendanya mulai model pembelajaran kekinian hingga indeks realisasi Pancasila.



Pada tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dibentuk. Biara Pancasila dan sosialisasinya. Kepala UKP-PIP, Yudi Latif, punya strategi implementasi. Agar ajaran diterima sebagai nilai luhur, kata Yudi, setidaknya dua lapisan harus dilalui. Yakin lapis keyakinan dan pengetahuan.

Pada lapis keyakinan, seseorang harus sudah percaya Pancasila sebagai nilai luhur dan ideal. Ketika sudah masuk fase tersebut, akan mudah naik ke tahap selanjutnya. Agar sampai ke sana, penting juga menampilkan mitos positif Pancasila. "Kita harus menghadirkan kisah bangsa majemuk bisa bersatu. Mitos untuk membangkitkan gotong royong," kata doktor sosiologi politik dari Australian National University ini kepada GATRA.

Apa yang disampaikan Yudi tersebut merupakan salah satu pekerjaan rumah lembaga yang dinakhodainya sejak 7 Juni lalu. Lembaga nonstruktural dibentuk dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP itu lahir untuk membantu Presiden merumuskan arah

kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila.

Saat ini, spirit Pancasila meredup setelah pelajaran Pancasila dihilangkan dari dunia persekolahan. "Selingga Pancasila mulai aus dari segi keyakinan umum. Pancasila juga kurang dipahami kandungan nilainya. Secara perilaku pun menjadi kurang dibumikan," ungkap penulis buku *Revisi Pancasila* tersebut.

Hadirnya UKP-PIP bisa jadi angin segar pemerintahan. Sayangnya, kewenangannya terbatas. "Jadi angin overekspektasi, karena unit ini lebih menekankan pada masalah koordinasi, pengendalian, dan evaluasi saja," ungkap Direktur Eksekutif Reform Institute itu. Apalagi, dengan durasi kerja hanya dua tahunan, menurut Yudi, kewenangan membuat program langsung dari UKP-PIP terbilang terbatas.

Meski demikian, Yudi menjelaskan, ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus UKP-PIP. Di antaranya, ia akan menekankan tentang rencana Kemendikbud menjadikan Pancasila sebagai pelajaran wajib kembali. Serta bagaimana menyuguhkan metode belajar dan pengajaran



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum salat jumat di Monas, Jakarta

melontarkan tuduhan yang tidak berdasar," katanya.

Mengkritik Pemerintah, menurut Tjipta, mestinya diarahkan kepada kebijakan. "Kritik, sekeras-kerasnya kritik diperbolehkan dan dibenarkan dalam sistem demokrasi. Tapi, jangan masuk ke *person, personal*," Tjipta mengingatkan.

Tjipta Lesmana mengungkapkan, sahabat yang baik justru mengkritik kelemahan atau kekurangan agar sahabatnya tidak celaka. Dalam kritik itu ada masukan yang membangun, untuk membantu perubahan pemerintahan ke arah yang lebih baik. "Saya mengkritik kebijakan Jokowi karena saya masih menilai bahwa Jokowi pemimpin yang bagus. Saya masih mencintai Joko Widodo. Kalau saya sudah benci dengan Joko Widodo, saya tutup mulut, masa bofo ya. Hancur-hancur, silakan saja, buat apa saya *are?* Pemimpin mesti tahu kenapa begitu. Mengkritik jangan serta-merta digebuk. Kami mengkritik, kalau kritiknya konstruktif berarti kami mencintai orang tersebut. Kami masih menganggap teman," katanya.

Salah satu kelemahan terbesat yang dilihat Tjipta adalah orang-orang di lingkaran Jokowi. Ring satu Jokowi ditempati orang-orang yang punya kepentingan tertentu, pengusaha-pengusaha besar, yang kerap ingin menjejak atau menghalangi langkah Presiden Jokowi. "Selangga saat melangkah, seringkali dijegal. Kakanya ditarik, tangannya ditarik. Dan Pak Jokowi tidak punya keberanian untuk melawan orang-orang di ring satu itu. Padahal dia tahu persis yang ingin menjegalnya. Jokowi suka lupa atau memang, maaf, penakut. Dia lupa bahwa dia Presiden RI, kepala negara," tegasnya. Padahal, UUD 45 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada presiden.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI, enggan menanggapi mudahnya Pemerintah dan Kepolisian menyematkan label makar yang kemudian berujung pada dilepaskan orang dilabel itu. Misalnya terhadap sebelas orang ditangkap karena dianggap makar, beberapa waktu lalu. "Sebaiknya dikomfirmasi kepada pihak kepolisian, karena ini menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan indikasi kejahatan keamanan negara sebagaimana diatur dalam KUTIP pasal 107," katanya.

Takhanya menangkap mereka yang diduga makar pada aksi 212, polisi pun menangkap orang yang termasuk dalam kelompok Saracen. Kelompok itu diduga menyebarkan isu kebencian dan SARA, serta menerima bayaran atas



Jurnal
Gatra

melakukannya itu. Untuk kasus Saracen ini, Tjahjo mengapresiasi langkah kepolisian. "Saracen adalah jaringan yang sangat terorganisir, siapa pun boleh mengeluarkan pendapat dalam media sosial, asalkan tidak melakukan fitnah, penyebaran kebencian, dan adu domba," katanya.

Namun, Tjahjo tidak mau berkomentar lebih jauh karena masalah tersebut sudah ada di tangan kepolisian. "Kami percayakan kasus Saracen ini kepada Kepolisian. Biarkan polisi yang memproses hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Terhadap anggapan bahwa Pemerintah makin mengekang kebebasan berpendapat masyarakat, Tjahjo menyatakan tidak sependapat dengan hal tersebut. "Tentu saja tidak, justru hal tersebut bertujuan untuk memastikan ketertiban di masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa yang beradab, tanpa fitnah, dan adu domba," katanya. Indikasi proses pidana terhadap Saracen, lanjutnya, sebaiknya diserahkan saja sepenuhnya kepada Kepolisian.

Tjahjo menyanggah pendapat yang menyebutkan bahwa Pemerintah anti-kritik. "Pemerintah tidak anti-kritik, Pemerintah justru sangat terbuka dan transparan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan," katanya. Kebebasan berpendapat, lanjutnya, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kata Tjahjo, Presiden juga sangat terbuka terhadap kritik. Masyarakat atau siapa pun boleh mengkritik Presiden atas kinerja yang diambil pemerintah. "Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menubar kebencian," katanya. ■

ROHMAT HARYADI DAN BERNADETTA FEBRIANA

Pemerintah tidak antikritik, justru sangat terbuka dan transparan dalam tata kelola pemerintahan.

Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri



38,9%. Dan sebagaimana telah banyak diprediksikan, urutan kedua ditempati Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperoleh 12%. "Nama-nama lain di bawah 2%," kata Direktur Eksekutif SMRC, Dwyadi Hana.

SMRC mencatat, sejak Oktober 2016 sampai Januari 2017, dukungan terhadap Jokowi cenderung menurun. Tapi setelah itu dukungan cenderung meningkat. Sebaliknya, Prabowo ada peningkatan dukungan pada Mei 2017, tapi menurun hingga saat ini kembali pada posisi awalnya, 12%-13%.

Gap antara Jokowi dan Prabowo itu akan lebih besar ketika pertanyaan diajukan dengan model semi terbuka. Jokowi mendapat dukungan 46%, sedangkan Prabowo 19%. Sementara itu, jika diajukan pertanyaan berhadapan, Jokowi meraup 57,2% dukungan, sementara Prabowo di 32%. Sebagai catatan, tren dukungan terhadap Jokowi dalam simulasi *head to head* meningkat dibandingkan dengan Mei 2017, dengan dukungan 53,7%. Sebaliknya, tren dukungan terhadap Prabowo menurun. Pada Mei 2017, Prabowo meraih dukungan 37,2%.

"Kesimpulannya, belum ada lawan yang kompetitif terhadap Presiden Jokowi. Yang paling kompetitif adalah lawan latarnya," kata Dwyadi.

Menguatnya dukungan terhadap Jokowi dalam survei ini ikut dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap kinerja

Basuki Tjahaja Purnama saat tiba di rumah tahanan Cipinang, Jakarta

yang totalnya mencapai 68%. "Sejak September 2015, tataran tingkat kepuasan ini relatif stabil dan potensial buat petahana. "Peluang untuk menang lagi (di pilpres 2019)," Dwyadi menambahkan. Sebagai perbandingan, dua tahun sebelum pilpres 2009, tingkat kepuasan publik terhadap SBY di angka 53% dan ia terpilih kembali.

Pencapaian dengan kecenderungan penguatan yang sama terbaca dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017. Survei nasional ini juga meliputi 1.220 responden dengan *margin of error* di kisaran 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Pada bagian evaluasi publik terhadap keadaan politik nasional di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, 30% responden menyatakan baik, 38% menyatakan sama saja dengan tahun sebelumnya, dan 21% menyebut buruk. Tren evaluasi sektor politik ini dinilai menunjukkan penurunan dalam satu tahun terakhir.

Berbeda halnya dengan evaluasi atas keadaan keamanan nasional. Pada variabel ini, 62% responden menyebut baik, 27% menilai sama saja dengan tahun sebelumnya, dan 11% menyatakan buruk. Bedanya dengan keadaan politik, tren apresiasi terhadap keamanan nasional memperlihatkan kenaikan dalam satu tahun terakhir.

Jika sebelum ini telah disinggung temuan survei Indo Barometer mendapati isu SARA ke dalam kelompok tiga besar persoalan yang muncul di 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, maka dalam survei tiga tahun ini, responden menilai Jokowi-JK kian baik dalam menjamin kesetaraan hak-hak warga negara dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, maupun daerah asalnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 54% menilai kondisi kesetaraan itu membaik. Atau naik 21% dari pencapaian tahun lalu (Agustus 2016) yang di angka 33%. Sebaliknya, yang menyatakan kondisi kesetaraan itu semakin memburuk (7%) jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 9%.

Kepada wartawan GATRA Viridika Rizky Utama, peneliti politik Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menyebut dirinya masih mengkhawatirkan bahwa modus SARA dalam pilkada DKI lalu dikloning ke daerah-daerah lain dalam pilkada serentak 2018 nanti. Indikasinya ada terlihat di Jawa Barat, "Ini bisa jadi tantangan untuk elite politik; untuk memenangkan pilkada tanpa SARA," ujarnya. ■

BAMBANG SULISTIYO, ADITYA KIRANA, DAN HIDAYAT ADHININGRAT P.

Instabilitas politik bertujuan melemahkan, bukan menjatuhkan Jokowi.

Burhanuddin Muhtadi
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia



TIGA TAHUN
JOKOWI - JK



Anies Harefaan dan Sandiyo Uno saat dilantik menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022

MENJAGA KETERTIBAN BUKAN ANTIKRITIK

Kebebasan berpendapat hanyalah salah satu bagian dari demokrasi. Presiden harus lebih berani dalam menegakkan hukum. Teman terbaik adalah mereka yang menyampaikan kritik demi kebaikan. Mengapa Pemerintah takut terhadap Saracen?

Masyarakat yang terbelah menandai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka yang pro dan kontra pemerintah saling melaporkan kepada polisi. Utamain kebencian menjadi lisa mau untuk menjerat lawan. Peristiwa teranyar adalah masuknya Jonru Ginting ke dalam ranahan polisi karena ucapannya di media sosial yang dianggap menista keturunan Nabi SAW, September lalu.

Jonru Ginting dikenal berseberangan dengan kubu pendukung Jokowi. *Postingan*-nya di media sosial kerap mengkritisi, kalau tidak mau dibilang menyindir pemerintah. Bahkan jika diucapkan, bisa jadi, tulisannya bikin merah telinga atau membuat gondok para pendukung pemerintah.

Sebelum Jonru, kelompok Saracen juga dibekuk polisi. Kelompok yang mengambil nama yang digunakan orang Barat untuk menyebut masyarakat penghuni padang gurun di Timur Tengah itu kerap mem-*posting* tulisan yang menjelek-jelekkkan Pemerintah. Unggahan itu diduga kuat merupakan orderan dari mereka yang anti-Pemerintah. Ada putaran duit di balik *posting*-an Saracen.

Kini, Saracen harus mempertanggungjawabkan ujaran kebencian yang disebarkan. Terlepas dari semua itu, apakah serangkaian penersangkaan terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah merupakan wujud aksi antikritik?

Pada saat heboh demonstrasi berlabel nomor cantik, seperti 411, dan 212, sejumlah aktivis ditangkap dengan tuduhan makar. Sebuah tuduhan yang tentunya tidak main-main. Namun, begitu ditsangkakan, ujungnya tidak jelas. Para pemakar malah dibiarkan melenggang bebas. Hasil pemeriksaan pun terkesan ditutupi atau dirahasiakan, tidak transparan.

Ketidakpastian hukum inilah yang membuat pengamat politik Tjipta Lesmana berang. Menurutinya, pada masa pemerintahan Soeharto, para pelaku diseret ke pengadilan agar masyarakat bisa mengetahui letak kesalahannya, tetapi sekarang tidak. Inilah yang dituntut dari

pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu bertindak lebih tegas dan lebih berani dalam penegakan hukum. "Saya kepingin Jokowi ada keberanian sebetulnya," katanya.

"Jangan hanya malam-malam yang demo pertama itu jam 12.20 dinihari, akhirnya Presiden Jokowi tampil di depan banyak media. Pakai jaket, kelihatan kurang sehat. Jokowi, didampingi Panglima TNI, Poltu, Kepala BIN, memberikan keterangan pers," katanya. Menurut Tjipta Lesmana, ada yang menarik saat Presiden menanggapi aksi demo yang dipimpin Habib Rizieq. Selain memberikan apresiasi Presiden menambalkan kalimat, "Sayangnya, aksi-aksi itu telah diboncengi sejumlah polisi."

Karena yang menyampaikan adalah Presiden, kata Tjipta, rakyat tentu menilai hal itu benar, tidak ada unsur kebohongan apalagi fitnah. Tapi sayangnya hal tersebut tidak ada kelanjutannya. "Itu kan katanya 'diboncengi', ada tujuan makar segala. Yang diperiksa banyak, 10 orang lebih. Waktu itu polisi melakukan pemeriksaan tuduhan makar, tapi begitu saja. Satu-satu dilepas, satu-satu dilepas" katanya.

Dalam pandangan profesor yang mengajar di Universitas Budi Luhur itu, kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 3 tahun terakhir ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya adalah dari sisi penegakan hukum (*law enforcement*) dan di bidang ekonomi, yang menurut Tjipta, Presiden Jokowi seperti lupa terhadap Nawacita-nya.

Kelebihan Jokowi terlihat dari semangatnya dalam membangun infrastruktur di berbagai bidang. Misal pembangunan jalan tol, dermaga, pelabuhan, kereta api, hingga membangun daerah dari pinggiran. Menurut Tjipta, hal itu sangat bagus. Cuma sayangnya *overdosis*. "Saya berusaha objektif, saya tidak sentimen. Saya tetap melihat Jokowi *good leader*, pemimpin yang bagus. Tapi Jokowi lupa, kita tidak punya uang. Itu kan ratusan triliun. Dari mana uangnya? Akibatnya, Sri Mulyani, mungkin makin rontok rambutnya. Saya kasihan, saya prihatin. Saya angkat topi untuk Sri Mulyani," katanya.

"Dia punya utang, pinjamnya sebagian besar dari RRC, dari Cina. Ini amat sangat bahaya," katanya. Boleh dekat dengan negara mana pun, tapi jangan terlalu dekat.



TIGA TAHUN
JOKOWI - JK

LUGAS MENINDAK ORMAS BABLAS

Tegas pada ormas anti-Pancasila, Jokowi menerbitkan Perppu Ormas dan membubarkan HTI. Ia pun menyatakan akan menggebuk PKI. Perppu dikritik karena menghilangkan mekanisme peradilan.



Mahasiswa Universitas 17 Agustus membawa poster usai mengikuti kuliah Pancasila